



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

KATA PENGANTAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) memiliki kewajiban untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dasar hukum penyusunan Rencana Strategis ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban amanah dan tugas-tugas penanggulangan bencana sekaligus aksi-kemampuan baik dalam upaya pengurangan risiko bencana, tindakan saat tanggap darurat serta program / kegiatan pada masa pemulihan pasca bencana.

Dengan dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo ini dapat dijadikan pedoman dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Sidoarjo, Januari 2023

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sidoarjo



Ir. DWIDJO PRAWITO, M. MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 196510121992021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO.....	12
2.1 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI.....	12
2.3 KINERJA PELAYANAN.....	34
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo.....	42
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN SIDOARJO.....	57
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	57
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	77
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	90
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	95
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	98
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	104
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	107
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	109
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	142
BAB VIII.....	146
PENUTUP.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2022 ...	24
Tabel 2. 2 Pegawai ASN BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Gol. Ruang & Pendidikan	25
Tabel 2. 3 Pegawai THL BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Jabatan & Pendidikan.....	28
Tabel 2. 4 Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Sidoarjo.....	32
Tabel 2. 5 Data Pos PMK sampai dengan tahun 2021	32
Tabel 2. 6 Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	32
Tabel 2. 7 Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan BPBD	34
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	38
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo	40
Tabel 2. 10 Hasil Perhitungan dan Pengukuran Analisis TOWS	48
Tabel 2. 11 Perbandingan Sasaran Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana	50
Tabel 2. 12 Perbandingan Sasaran Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	50
Tabel 2. 13 Perbandingan Sasaran Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.....	51
Tabel 2. 14 Hasil Analisis terhadap telaahan dokumen RTRW	53
Tabel 2. 15 Hasil Analisis terhadap Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo.....	54
Tabel 3. 1 Kondisi Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo.....	57
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk dan luasan per Kecamatan.....	65
Tabel 3. 3 Waktu Tempuh Berdasarkan Jarak Jangkauan.....	69
Tabel 3. 4 Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Air (Ha)	71
Tabel 3. 5 Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.....	74
Tabel 3. 6 Sektor di Kabupaten Sidoarjo	75
Tabel 3. 7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	77
Tabel 3. 8 Telaahan Renstra pada Kementerian / Lembaga sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong.....	80

Tabel 3. 9 Telaahan Renstra pada Kementerian / Lembaga sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong.....	83
Tabel 3. 10 Telaahan Renstra pada Perangkat Daerah Provinsi sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong.....	85
Tabel 3. 11 Telaahan Renstra pada Perangkat Daerah Provinsi sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong.....	88
Tabel 3. 12 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	90
Tabel 3. 13 Telaah Kajian Lingkungan Strategis Kabupaten Sidoarjo.....	91
Tabel 3. 14 Skor Kriteria Penentuan isu-isu Strategis.....	95
Tabel 3. 15 Nilai Skala Kriteria Atas Isu-isu Strategis.....	96
Tabel 4. 1 Klasifikasi Nilai IPP	102
Tabel 4. 2 Tujuan (indikator dan target tujuan) dan Sasaran (indikator dan target sasarn) RENSTRA BPBD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.....	104
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sidoarjo	108
Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2026.....	110
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dan Renstra OPD.....	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo.....	22
Gambar 2. 2 Diagram Hasil Analisis TOWS (SWOT).....	49
Gambar 3. 1 Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo (Kajian Tahun 2015) ...	64
Gambar 3. 2 Peta Tingkat Kepadatan Penduduk	66
Gambar 3. 3 Peta jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran	68
Gambar 3. 4 Peta Ruas jalan	70
Gambar 3. 5 Peta Sungai Kabupaten Sidoarjo	72
Gambar 3. 6 Peta Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Sidoarjo	72
Gambar 3. 7 Peta Rencana Usulan WMK, Sektor dan Pos.....	73
Gambar 3. 8 Peta Rencana Jangkauan Usulan WMK, Sektor dan Pos.....	73
Gambar 3. 9 Identifikasi Permasalahan di BPBD.....	94
Gambar 4. 1 Komponen Indek Resiko Bencana	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Sidoarjo, menurut buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BNPB adalah daerah rawan bencana dengan skor 78,89 dan termasuk dalam kelas risiko sedang dengan ancaman banjir, kebakaran dan puting beliung. Masih merujuk dalam dokumen yang sama (IRBI Tahun 2020), menurut tabel nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ke 38, dengan perkembangan yang secara konsisten mengalami penurunan nilai indeks risikonya mulai dari 149.60 (2015), 149.60 (2016), 132.02 (2017), 85.29 (2018), 81.62 (2019) dan 79.15 (2020) dengan kelas risiko sedang. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal luas di seluruh pelosok negeri bahkan dunia dengan peristiwa atau kejadian bencana yang populer dengan *Gunung Sidobaju t a n ' (L u s i) '* yang menunjukkan bahwa *dapat c a m a n* dipandang dengan sebelah mata dan penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah. Rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh OPD dalam menyusun rencana kerja OPD. Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai Tupoksi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun anggaran disebut Rencana Kerja (Renja) OPD.

Renja memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dan Renstra OPD



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Seiring diterbitkannya Undang-undang tersebut, maka acuan dan pegangan bagi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan lebih berinteraksi, sinkron dan sinergis yang membawa konsekuensi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen-dokumen Rencana Pembangunan lainnya. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo, salah satu dokumen rujukan

awal yang digunakan adalah rancangan awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai perangkat daerah selama lima tahun baik untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki layanan dalam rangka pemenuhantugas dan fungsi perangkat daerah terkait dan rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya, Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan yang fokus dan terukur untuk mendukung terwujudnya layanan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.

Selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai perturan dan ketentuan yang antara lain bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk membantu Bupati di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana sebagai bentuk dukungan OPD di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai OPD pelaksana utama dan terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana sudah seharusnya mempersiapkan tindakan penanggulangan bencana dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tata nilai dan kearifan lokal dengan menggunakan semua potensi daerah. Renstra mencakup kebijakan dan program penanggulangan bencana sejak pencegahan yang bersifat komprehensif, penanganan tanggap darurat yang bersifat krisis dan tahap rekrontruksi yang berkesinambungan. Juga mengatur manajemen semua sumberdaya daerah termasuk perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pertanggung jawabannya, agar dapat dioptimalkan untuk penanggulangan bencana berbasis nilai – nilai lokal.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sidoarjo diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan yang melibatkan semua unsur dalam Pentahelix. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat akar rumput. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidoarjo ini dirumuskan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai salah satu OPD serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan penanggulangan bencana daerah. Disamping mempunyai keterkaitan dengan RPJM dan Renja, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai keterkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam penyusunannya terutama pada penentuan visi sampai formulasi rencana tahunan harus melibatkan seluruh kajian dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari aturan dan pedoman yang terus mengalami perubahan yang lebih baik.

Sebagai sebuah dokumen, Renstra bukanlah sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis yang pada suatu saat dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan / program penanggulangan bencana. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat perencanaan jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan untuk mendukung perencanaan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan optimal. Sebagai dokumen resmi untuk periode tertentu, Rencana Strategi BPBD juga memuat klarifikasi eksplisit atas visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang kemudian diterjemahkan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas BPBD beserta tolok ukur pencapaiannya. Dalam hal Penanggulangan Bencana, dengan merujuk pada dokumen Rencana Nasional (RENAS) Badan Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2020 -2024, dinyatakan bahwa Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan B e r k e l a n j u t a n Dengan demikian Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah “ P e n i n g k a t a n Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan Untuk Pembangunan B e r k e l a n j u t a n ” .

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022 memberikan rekomendasi untuk dilakukannya Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Oleh sebab itu, maka BPBD Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang

lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelamatan dan Pertolongan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran;
 23. Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah;
 24. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 25. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 27. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019;
 28. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 30. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 31. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
 32. Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 34. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 35. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 - 2024
 36. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang/ Tata Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2025;
43. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
44. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan arah bagi BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan program dan anggaran kegiatan, dalam menjalankan amanah Visi, Misi dan atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten.
- b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sidoarjo
- c. Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait di tingkat

Kabupaten Sidoarjo dalam setiap program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

- d. Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.
- e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Sidoarjo

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bertujuan:

- a. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis.
- b. Terciptanya program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021-2026;
- c. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap dalam struktur organisasi BPBD.
- d. Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- e. Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan untuk mendukung upaya Penanggulangan bencana di kabupaten Sidoarjo.
- f. Terumuskannya analisis dan evaluasi kebijakan dan program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo yang dapat dijadikan bahan / materi formulasi program-program penanggulangan bencana yang lebih efektif dan akuntabel.
- g. Terwujudnya kolaborasi Pentahelix dan atau Hexahelix yang melibatkan *affected communities* (masyarakat terdampak) dalam menunjang keberhasilan implementasi program / kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD 2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Sidoarjo 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo
BAB III	PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS BPBD KAB. SIDOARJO
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VII	PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN SIDOARJO

2.1 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah, yang kemudian diperbarui dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, BPBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Badan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- c. Bidang-Bidang yang dipimpin kepala Bidang , terdiri dari :
 - 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - 3) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas sebagai komando, koordinator, pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana/memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan program;
- 2) koordinasi pelaksanaan tugas badan;
- 3) pembinaan pelaksanaan program dan kinerja badan;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
- 5) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- 2) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- 5) pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
 - pelaksanaan administrasi keuangan;
 - pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 - pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
 - penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- 6) pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi:
 - penyusunan program kerja badan;
 - pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan badan;
 - penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 - pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
 - penyusunan laporan kinerja badan;

- pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan
- 7) pelaporan kinerja badan;
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - 3) pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - 4) pelaksanaan sub kegiatan penguatan kelembagaan bencana, meliputi :
 - menyusun rumusan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Bencana;
 - melaksanakan kebijakan teknis Penguatan Kelembagaan Bencana;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana bidang pencegahan;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis data potensi bencana;
 - melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, kepada stakeholder/masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - 1) pelaksanaan sub kegiatan pencegahan, meliputi :
 - menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
 - menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;

- menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana;
 - menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - menyiapkan bahan pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerahmenyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) pelaksanaan sub kegiatan kesiapsiagaan, meliputi :
- menyusun rumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan;
 - melaksanakan kebijakan teknis kesiapsiagaan yang meliputi:
 - a) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi kajian resiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi;
 - b) menyiapkan dan melaksanakan mitigasi bencana;
 - c) menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - d) menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - e) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - f) menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - g) menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;

- h) menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana;
 - i) menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - j) menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- menyusun dan memperbarui data kesiapsiagaan;
 - melaksanakan ketatausahaan Bidang dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- 3) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
 - 4) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - pelaporan kinerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.
- d. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :
- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 4) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - 5) pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 6) pelaksanaan sub kegiatan kedaruratan dan logistik, meliputi:
 - menyusun rumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik;
 - melaksanakan kebijakan kegiatan kedaruratan dan logistik;
 - menyusun dan memperbarui data kedaruratan dan logistik;

- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik;
- menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik;
- menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik;

- menyusun program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- melaksanakan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- melaksanakan koordinasi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi menuju pemulihan;
- melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana dan transisi menuju pemulihan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang.

7) pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi:

- menyusun rumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- menyusun dan memperbarui data rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- menyusun program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, melalui penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan penanganan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan;
- melaksanakan penanganan pasca bencana melalui kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali sarana prasarana terdampak bencana;
- melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- 8) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 9) pelaporan kinerja bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

e. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang Pemadam Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 2) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 3) pelaksana sub urusan pencegahan kebakaran, meliputi :
 - melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
 - melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
 - melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik kapasitas teknis maupun manajemen;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan, penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat dan dunia usaha;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis Pencegahan Kebakaran;
 - melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- 4) pelaksanaan sub kegiatan sarana prasarana, meliputi :
- menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - menyelenggarakan pengadaan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dan alat pelindung diri aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;

- melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten;
- melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
- melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis sarana prasarana;

5) Pelaksanaan sub kegiatan pemadaman dan penyelamatan, meliputi :

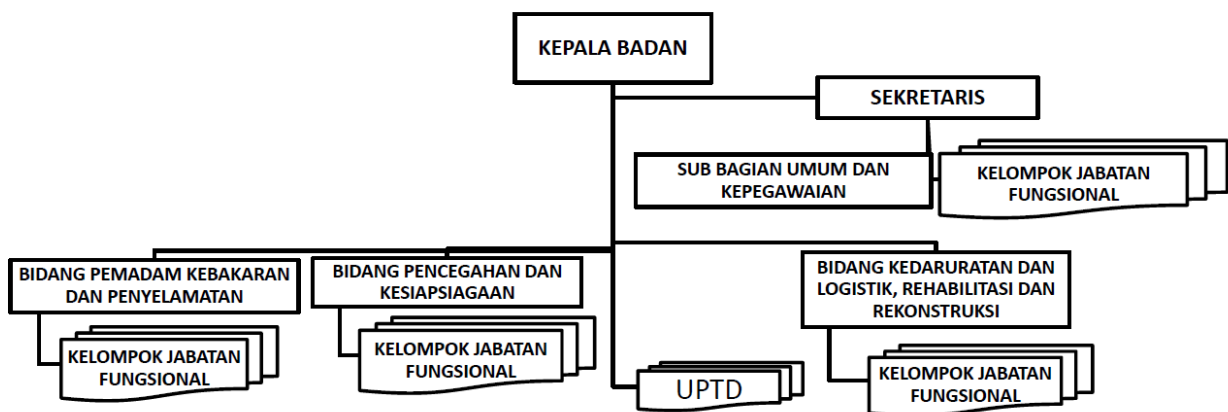
- merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman, operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- menyelenggarakan operasi pemadaman kebakaran, operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran serta penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- menyelenggarakan layanan respon cepat (respon time) pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut;

- melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran

- 1) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pemadam Kebakaran;
- 2) pelaporan kinerja bidang;
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengantugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo

◁ Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran, Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah pengampu SPM pada Sub Urusan Bencana dan Kebakaran. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana; dan

c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sedangkan jenis pelayanan sub urusan kebakaran meliputi :

- a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset penting yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan modal yang menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar pegawainya merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 294 orang, yang terdiri dari 73 orang Aparatur Sipil Negara dan 221 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2022

No	STATUS / POSISI	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	65 Orang	22,97%
2	Tenaga Harian Lepas (THL)		
	2.1. Pengadministrasian Umum	9 Orang	
	2.2. Pengemudi	1 Orang	
	2.3. Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1 Orang	
	2.4. Pramu Kebersihan	5 Orang	
	2.5. Petugas Keamanan	15 Orang	
	2.6. Pengelola Kepegawaian	1 Orang	
	2.7. Teknisi Peralatan dan Mesin	4 Orang	
	2.8. Pranata Pemadam Kebakaran	143 Orang	
	2.9. Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	30 Orang	
	2.10 Petugas / Operator PUSDATIN - PUSDALOPS	9 Orang	
	Total THL	218 Orang	77,03%
	Total Pegawai BPBD	283 Orang	100,00

Data di atas menunjukkan bahwa 22,97% SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo berstatus ASN dan sisanya 77,03% merupakan Tenaga Harian Lepas (THL). Dari jumlah THL sebesar 218 orang, 65% adalah tenaga yang menjadi Pasukan Pemadam Kebakaran. Jumlah SDM BPBD Kabupaten Sidoarjo (PNS dan THL) yang mencapai 283 orang merupakan jumlah yang relatif besar dan merupakan kekuatan bagi organisasi BPBD. Namun dengan melihat status

SDM yang melebihi 50% adalah THL juga memberikan sinyal kerawanan dalam operasionalisasi tugas pokok dan fungsi, karena status THL dimungkinkan setiap saat akan berhenti jika mereka mendapatkan tempat kerja yang menurut mereka lebih menjanjikan.

Pembinaan kepada THL harus senantiasa dilakukan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka dalam rangka membantu mewujudkan terbangunnya karakter pribadi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. THL memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kedudukannya tidak sama dengan kedudukan ASN, namun THL diharapkan tetap dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya.

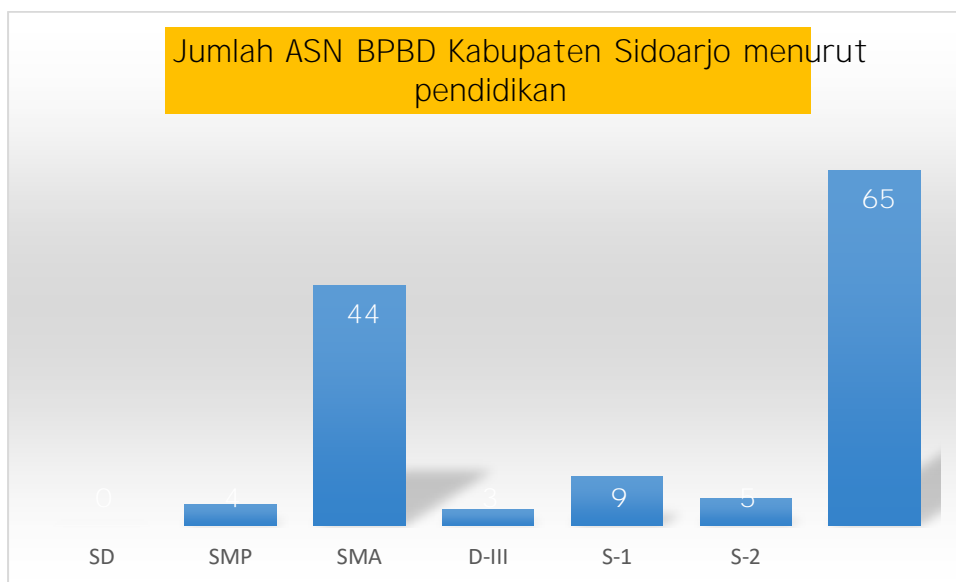
Selanjutnya dalam tabel beriku disjikan komposisi pegawai atau Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang dan pendidikannya, sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Pegawai ASN BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Gol. Ruang & Pendidikan

No	JABATAN	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1	Kepala Pelaksana BPBD	IV/c	S-2
2	Sekretaris	IV/a	S-1
3	Kasubbag. Umum	III/d	S-2
4	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	III/b	SMA
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	II/d	SPMA
6	Pramu Bakti	II/b	MTs
7	Petugas Keamanan	II/b	Paket C/IPS
8	Petugas Keamanan	II/c	SMA
9	Petugas Keamanan	I/d	SD
10	Petugas Keamanan	II/b	Paket C/IPS
11	Pranata Komputer Pelaksana	II/d	D.III
12	Kasubbag. Kepegawaian	III/d	S-1
13	Kasubbag. Keuangan	III/c	S-1
14	Bendahara	III/c	S-1
15	Pengelola Keuangan	II/c	STM
16	Pengelola Bahan Perencanaan	II/d	S-1
17	Pengelola Bahan Perencanaan	II/c	STM
18	Pengadministrasi Penerimaan	II/d	STM
19	Kabid. Pemadam Kebakaran	IV/a	S-2
20	Kasi. Sarana dan Prasarana	III/d	S-1
21	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	III/b	S-2
22	Teknisi Peralatan dan Mesin	III/d	STM

No	JABATAN	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
23	Pengelola Pengendalian dan Operasional	II/c	D.III
24	Pranata Pemadam Kebakaran	III/c	S-1
25	Pranata Pemadam Kebakaran	III/b	SMA
26	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
27	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
28	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
29	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
30	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
31	Pranata Pemadam Kebakaran	II/b	SMP
32	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	STM
33	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
34	Pranata Pemadam Kebakaran	II/b	SMP
35	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
36	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
37	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMK
38	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
39	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
40	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
41	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
42	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
43	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
44	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
45	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
46	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
47	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
48	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
49	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
50	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
51	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	Paket C
52	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
53	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
54	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
55	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	SMA
56	Pranata Pemadam Kebakaran	II/c	STM
57	Pranata Pemadam Kebakaran	II/d	STM
58	Pranata Penyelamat Bencana	II/d	SMA
59	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	II/c	STM
60	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	I/c	SD
61	Juru Pungut Retribusi	II/d	SMA
62	Juru Pungut Retribusi	II/d	SMA
63	Kabid. Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik	IV/a	S-2
64	Kasi. Pencegahan	III/d	S-2
65	Analisis Bencana	III/a	S-1

No	JABATAN	GOL. RUANG	PENDIDIKAN
66	Pengadministrasi Umum	II/d	SMA
67	Pengelola Data	II/c	STM
68	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IV/a	S-2
69	Kasi. Rehabilitasi	III/d	S-2
70	Pengelola Data	II/d	SMA
71	Pengelola Data	II/c	D.III
72	Pengadministrasi Umum	II/d	STM



Grafik 2. 1 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Sidoarjo menurut Pendidikan

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pendidikan para pegawai ASN di BPBD Kab. Sidoarjo adalah SMA sederajat (68,05%) dan bahkan ada yang berpendidikan SD (dua orang dengan posisi sebagai petugas keamanan dan pengemudi mobil pemadam kebakaran). Situasi demikian dalam konteks pengembangan organisasi publik seperti BPBD, perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja ke depan dengan tuntutan profesionalitas. Tidak berlebihan kiranya untuk semua posisi ASN dalam BPBD ke depan minimal adalah SMK atau SMA Sederajat. Agar para ASN ini dapat lebih mudah meningkatkan kapasitasnya melalui jenjang Pendidikan formal selanjutnya atau pelatihan-pelatihan sesuai kompetensinya, oleh karena bekal minimal pendidikannya mencukupi. Dan ada potensi berkembang untuk meningkatkan kariernya. Di sisi lain komposisi jabatannya Sebagian besar adalah pranata pemadam kebakaran, sedangkan jumlah ASN yang berhubungan langsung dengan kegiatan kebencanaan, jumlahnya masih belum proporsional dengan ASN pranata pemadam kebakaran. Ke depan jumlah ASN yang

berkompeten dan portofolio perlu ditambah secara proporsional agar dapat meningkatkan kinerja penanggulangan bencana. Adapun pengembangan kompetensi yang diperlukan adalah di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, komunikasi risiko bencana, kedaruratan dan pemulihan pasca bencana, khususnya dalam melakukan A2R2 (Asesmen Awal Rehabilitasi Rekonstruksi) yang mendukung penyusunan Rencana Pemulihan Dini (RPD) dan R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tabel 2.3 Pegawai THL BPBD Kab. Sidoarjo Menurut Jabatan & Pendidikan

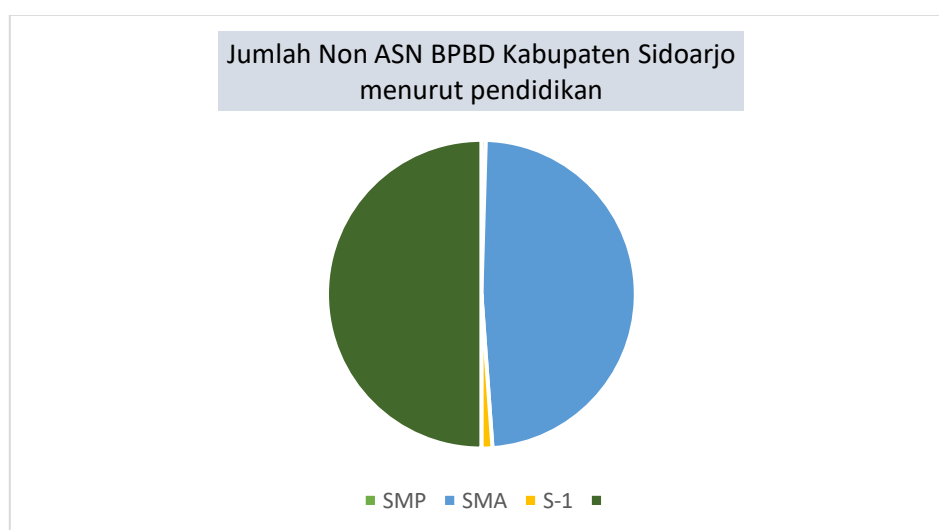
No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	50	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
2	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	51	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
3	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	52	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
4	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat	53	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
5	Pengemudi	SMA/Sederajat	54	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
6	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	55	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
7	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	56	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
8	Pramu Kebersihan	Paket C	57	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
9	Pramu Kebersihan	SMP/Sederajat	58	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
10	Pramu Kebersihan	SMA/Sederajat	59	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
11	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	60	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
12	Petugas Keamanan	MA/Sederajat	61	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
13	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	62	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
14	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	63	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
15	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	64	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
16	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	65	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
17	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	66	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
18	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	67	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
19	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	68	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
20	Petugas Keamanan	MA/Sederajat	69	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
21	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	70	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
22	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	71	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
23	Petugas Keamanan	Paket C	72	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
24	Petugas Keamanan	Paket B	73	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
25	Petugas Keamanan	SMK/Sederajat	74	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
26	Pengelola Kepegawaian	SMA/Sederajat	75	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat
27	Pengelola Keuangan	MA/Sederajat	76	Pranata Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat

No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
28	Pengelola Keuangan	SMK/Sederaj	77	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
29	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sederaj	78	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
30	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sederaj	79	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
31	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sederaj	80	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
32	Teknisi Peralatan dan M	SMA/Sederaj	81	Pranata Pemadaman	SMA/Sederaja
33	Pengadministrasi Umum	SMK/Sederaj	82	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
34	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	83	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
35	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	84	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
36	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	85	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
37	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	86	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
38	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederajat	87	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
39	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	88	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
40	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	89	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
41	Pranata Pemadaman	SMA/Sederaj	90	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
42	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	91	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
43	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	92	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
44	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	93	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
45	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	94	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
46	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	95	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederajat
47	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	96	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
48	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	97	Pranata Pemadam Kebakara	SMA/Sederaja
49	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	98	Pranata Pemadaman	SMA/Sederaja
99	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	154	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
100	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	155	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
101	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederajat	156	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
102	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	157	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
103	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	158	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
104	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	159	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
105	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	160	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
106	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	161	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
107	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	162	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
108	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	163	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
109	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederajat	164	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
110	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	165	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
111	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	166	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
112	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	167	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja
113	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	168	Pranata Penyelamat Bencana	SMA/Sederaja

No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
114	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	169	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
115	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	170	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
116	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	171	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
117	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	172	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
118	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	173	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
119	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	174	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
120	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	175	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
121	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	176	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
122	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	177	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
123	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	178	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaja
124	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	179	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
125	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	180	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
126	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	181	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
127	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	182	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaj
128	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	183	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
129	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	184	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
130	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	185	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
131	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	186	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
132	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	187	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaj
133	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	188	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
134	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	189	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
135	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	190	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
136	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	191	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
137	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	192	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaj
138	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	193	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
139	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	194	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
140	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	195	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
141	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	196	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
142	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	197	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaj
143	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	198	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
144	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	199	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
145	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	200	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
146	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	201	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
147	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	202	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaj
148	Pranata Pemadam Keba	SMA/Sederaj	203	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
149	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaj	204	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja
150	Pranata Penyelamat Benc	SMA/Sederaj	205	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederaja

No	JABATAN	PENDIDIKAN	No	JABATAN	PENDIDIKAN
151	Pranata Penyelamat Be	SMA/Sederaj	206	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
152	Pranata Penyelamat Be	SMA/Sederaj	207	Pengemudi Mobil Pemadam	SMA/Sederajat
153	Pranata Penyelamat Be	SMA/Sederaj	208	Pengadministrasi Umum	SMA/Sederajat
209	Pengelola Data	SMK/Sederaj	25	Pengelola Data	S-1 Teknik Komp
210	Pengelola Data	SMA/Sederaj	26	Pengelola Data	S-1 Statistika
211	Pengelola Data	SMA/Sederaj	27	Pengelola Data	S-1 Teknik Inform
212	Pengelola Data	SMA/Sederaj	28	Pengelola Data	S-1 Informatika
213	Pengelola Data	MA/Sederaja			
214	Pengelola Data	S-1 Teknik Kom			

Dari tabel diatas jika kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik seperti dibawah ini, dapat dinyatakan bahwa mayoritas pegawai THL BPBD Kab Sidoarjo adalah SMA sederajat yang berjumlah 213 orang atau 96,38% dari jumlah THL secara keseluruhan. Dari aspek pendidikan dapat dinyatakan bahwa THL yng bekerja di BPBD Kab. Sidoarjo cukup representatif dalam menunjang kinerja BPBD. Namun demikian ke depan harus dipertimbangkan bukan hanya berdasarkan Pendidikan semata tetapi harus memiliki kompetensi dan portofolio yang menunjang dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kab. Sidoarjo, khususnya dalam program kegiatan penanggulangan bencana. Kompetensi yang diperlukan dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan mitigasi bencana, kedaruratan atau penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.



Grafik 2. 2 Jumlah Non ASN BPBD Kabupaten Sidoarjo menurut Pendidikan

2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo relatif cukup lengkap dan besar sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Jumlah Peralatan Operasional Kebencanaan BPBD Kab. Sidoarjo

NO	NAMA	MODEL	JUMLAH
1	Perahu karet	Dengan mesin	1 unit
2	Perahu karet	Tanpa mesin	2 unit
3	Gergaji mesin	Besar/ kecil	4 unit
4	Pompa air	Besar/ kecil	4 unit
5	Genset	Besar	3 unit
6	Tenda	Peleton	6 unit
7	Tenda	Regu	2 unit
8	Tenda	Pengungsi	3 unit
9	Tenda	Family	12 unit
10	Penjernih air	Portable	1 unit
11	Pelampung	Personal	50 unit
12	Radio komunikasi	HT/ RIG	16 unit
13	Sepatu karet	Water proof	20 unit

Tabel 2. 5 Data Pos PMK sampai dengan tahun 2021

No.	Pos PMK	Keterangan
1.	Unit Buduran	Milik Pemkab Sidoarjo / BPBD
2.	Unit Krian	Milik Pemkab Sidoarjo
3.	Unit Waru	Lahan dan Bangunan milik Pabrik Cat PT. Tunggal Djaja Indah
4.	Unit Porong	Milik Pemkab Sidoarjo
5.	Unit Candi	Lahan dan bangunan milik Pabrik Sepatu PT. Ecco Indonesia

Tabel 2. 6 Data Inventaris Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
1.	Mobil Angkut Peralatan dan Pasukan	Pick Up	Toyota Kijang KF 50	1995	60%
2.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
3.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Twin Agent	HINO Super Ranger	1995	40%
4.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Twin Agent	IZUSU Elf NKR66	2003	40%
5.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Supply	HINO Dutro	2006	75%
6.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 210 JL	2006	85%
7.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 235 JL	2007	85%
8.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Supply	HINO FG 235 JJ	2010	90%
9.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Daihatsu Terios	2010	100%
10.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
11.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
12.	Mobil Dinas (Station Wagon)	MPV	Toyota Rush	2012	100%
13.	Mobil Pemadam Kebakaran (Drop InUnit)	Twin Agent	IZUSU Panther	2012	100%
14.	Mobil Pemadam Kebakaran (Fire Truck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%
15.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 235 JJ	2014	100%
16.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Pick Up	IZUSU TBR 54	2015	30%
17.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%
18.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	FUSO FM 517 HS	2015	100%
19.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ10	2015	100%
20.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
21.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
22.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO FG 8JJ1D BGJ	2016	100%
23.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Water Tender	HINO Ramgers 235 PS	2017	100%
24.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	ripple		2018	100%
25.	Mobil Pemadam Kebakaran (FireTruck)	Triple Agent		2018	100%
26.	Mobil Angkutan Pasukan/Peralatan Kebencanaan	Pick up		2018	100%
27.	Mobil Dinas (Hibah dari BNPB)	MPV	Ford Ranger	2012	100%

No.	Jenis Kendaraan	Model	Merk	Tahun	Kondisi Barang
28.	Mobil Operasional Penyelamatan (Jeep)	MPV	IZUSU DMAX Single Cabin	2022	100%

2.3 KINERJA PELAYANAN

BPBD dituntut terus mensosialisasikan keberadaannya, peranannya dan fungsi yang diamanatkan, dalam rangka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peransatuan kerja lain yang terlebih dahulu ada. Kedepan BPBD akan terus berbenah serta memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. BPBD dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk **tanggap darurat** bencana, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pascabencana). Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) terkait, sesuai ketentuan tentang tahapan penanggulangan bencana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya Capaian kinerja layanan BPBD melalui LAKIP tahun 2021 sebagai tahun terakhir renstra periode sebelumnya (2016-2021) menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan BPBD

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	%Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan	Indeks Resiko Bencana (IRB)	99,7%	Berhasil

	Minimal (SPM)			
		Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran	82,78%	Berhasil
	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	97,5%	Berhasil
2	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	41,12%	Kurang Berhasil
		Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	100%	Berhasil
INDIKATOR KINERJA PENUNJANG :				
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	A	Berhasil
		Nilai RB	26,09	Berhasil
		Nilai IPP	A-	Berhasil
		Nilai SKM	Sangat Baik	Berhasil

Keterangan :

No.	% Capaian	Kategori
1	>100 %	Sangat Berhasil
2	90-100%	Berhasil
3	75-90%	Cukup
4	<75%	Kurang

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

SASARAN : Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai SPM

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber-daya manusia terbatas ;

- b. Fasilitas / sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang terbatas;
- c. Logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan;
- d. Terbatasnya jumlah pos pemadam kebakaran tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah yang rawan bencana dan kebakaran yang harus dilayani dengan akses terbatas;
- e. Beberapa kejadian kebakaran terjadi pada lokasi yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran sehingga mempengaruhi waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran;
- f. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur kebencanaan dan pemadam kebakaran belum terpenuhi dikarenakan tidak adanya anggaran diklat/pelatihan.

2) Upaya yang telah dilakukan :

- a. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana ,penggunaan anggaran dan sumber daya informasi;
- b. Menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk penambahan pos damkar baru;
- c. Memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana;
- d. Memprioritaskan pelatihan / edukasi kebencanaan untuk masyarakat di kawasan rawan bencana;
- e. Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM;
- f. Pembentukan dan Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- a. Mengupayakan mendapat dukungan pendanaan untuk efektifitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran;
- b. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo;
- c. Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- d. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
- e. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran melalui sosialisasi, edukasi dan komunikasi aktif (diklat, pelatihan, dsb.)
- g. Sertifikasi Personil Penanggulangan Bencana untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana;

- h. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan di wilayah / daerah rawan bencana

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

- a. Perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan BPBD;
- b. Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo masih perlu penguatan pada efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. Diperlukan penguatan pada mekanisme / SOP Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- d. Pencapaian sasaran dalam memenuhi waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran masih kurang dari target sehingga perlu ditingkatkan

5) Solusi dan upaya perbaikan di waktu yang akan mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

- 1. Penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Sidoarjo;
- 2. Memperkuat kapasitas kebencanaan dan penanggulangan kebakaran di wilayah dengan cara memberikan edukasi/pelatihan dan sosialisasi;
- 3. Penguatan kapasitas SDM Kebencanaan dan Kebakaran

Selanjutnya terkait dengan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo, pada dasarnya memiliki ragam pelayanan sebagai berikut :

TAHAPAN	KEGIATAN
PRA BENCANA	1. Sosialisasi Penanggulangan Bencana
	2. Sosialisasi Sekolah Aman Bencana
	3. Inisiasi, Koordinasi dan Pelatihan Kelompok Relawan
	3. Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan OPD terkait
	4. Pemasangan / Pemantauan Alat Peringatan Dini
	5. Inisiasi Kerjasama dengan Forum CSR Perusahaan di Sidoarjo
TANGGAP DARURAT	1. Pelaksanaan Bantuan Darurat (Non Kebakaran) 2. Layanan Pemadaman Kebakaran
PASCA BENCANA	1. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Non Kebakaran
	2. Pelaksanaan Bantuan Rehab / Rekon Kebakaran

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,68	0,74	0,80	N/A	N/A	0,68	0,72	0,78	N/A	N/A	100%	97,3%	97,5%
2	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	N/A	N/A	N/A	45%	45%	50%	55%	55%	32,87%	35,31%	41,54%	42,29%	41,12%	73%	78,46%	83,08 %	76,89%	74,76%
3	Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA PENUNJANG :																			
4	Nilai SAKIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81 (A)	N/A	N/A	N/A	N/A	80,57 (A)	N/A	N/A	N/A	N/A	99,46%
5	Nilai RB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27,22	N/A	N/A	N/A	N/A	26,09	N/A	N/A	N/A	N/A	95,85%
6	Nilai IPP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,50 (A)	N/A	N/A	N/A	N/A	4,20 (A-)	N/A	N/A	N/A	N/A	93,33%
7	Nilai SKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 (Sangat Baik)	N/A	N/A	N/A	N/A	99 (Sangat Baik)	N/A	N/A	N/A	N/A	110%

Catatan :

- ◁ Rasio capaian = realisasi (:)/target x 100%
- ◁ Target penurunan IRB berdasarkan target yang telah ditetapkan nasional yaitu penurunan sebesar 30% dalam waktu 5 (lima) tahun. Sehingga dengan menggunakan *baseline* skor IRB Tahun 2013 yaitu 149,6 telah ditetapkan target penurunan sebesar 6% setiap tahunnya.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan	N/A	6.558.818.30	8.422.677.90	15.332.095.224	9.771.702.597	N/A	5.417.654.239	7.409.744.311	14.254.635.791	9.489.697.187	N/A	82,6%	87,97%	92,97%	97,11%

n Non Kebakaran															
Program Penanggulangan Bencana	N/A	1.450.516.47	2.319.740.00	2.372.985.271			1.263.096.550	1.826.300.671	2.168.705.447			87,08 %	78,73 %	91,39 %	
Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	N/A	715.704.795	1.005.229.800	N/A	N/A	N/A	492.254.42	797.459.700	N/A	N/A	N/A	69%	79,33 %	N/A	N/A
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	3.823.373.230	4.072.158.994	12.951.055.247	12.538.274.604	N/A	2.983.572.393	2.895.713.172	12.524.903.445	11.938.310.794	N/A	78%	71,11 %	96,71 %	95,21 %

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Sidoarjo

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang direncanakan di dalam Renstra sesuai Visi dan Misi di dalam RPJMD dapat berjalan baik, diperlukan langkah strategis, kebijakan dan program yang jelas dan realistis. Langkah-langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ini berarti dalam hubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo, perlu dilihat dan diketahui kondisi internal dan eksternal BPBD Kabupaten Sidoarjo. Alat dan metodologi untuk melihat lingkungan organisasi yang dikenal luas dan umum, diantaranya adalah; *SWOT Analysis* Namun melihat kondisi organisasi dikaitkan dengan resiko bencana yang dihadapi, maka dipakai pendekatan TOWS. TOWS Analysis merupakan pengembangan dari *SWOT Analysis*, karena menurut Hermawan Kartajaya, *SWOT* lebih berorientasi masa lalu sedang pendekatan TOWS berorientasi ke masa depan dengan melihat terlebih dahulu Ancaman (*Threat*) sebagai faktor berpengaruh. Dengan demikian, potensi organisasi yang dilihat dan dianalisis digeser dari melihat Kekuatan (*Strength*) ke potensi Ancaman (*Threat*), diikuti melihat : Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*), dan Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki dan dihadapi organisasi. Analisis dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap butir TOWS yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo diasumsikan sebagai berikut.

Ancaman (*Threat*) adalah Situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Sedang Peluang (*Opportunities*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Di pihak lain Kelemahan (*Weak*) adalah sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, ketrampilan dan kapabilitas yang secara serius akan menghambat kinerja efektif organisasi, sedang Kekuatan (*Strong*) adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan yang dilayani atau ingin dilayani oleh organisasi. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi terhadap butir-butir TOWS yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo, dan dari uraian di atas, maka butir-butir TOWS yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

A. Faktor Eksternal Organisasi

1) Ancaman / Threat

- a. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh pada tingkat kerentanan warga terhadap bencana;
- b. Bencana Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap aspek fisik dan sosial ekonomi masyarakat di Sidoarjo;
- c. Bencana lumpur Sidoarjo berdampak pada keterbatasan kewenangan BPBD Sidoarjo dalam menanggulangi lumpur Sidoarjo;
- d. Cakupan wilayah yang berpotensi kebakaran cukup luas dan tidak sebanding dengan sarana prasarana yang dimiliki;
- e. Banyaknya industri di Kabupaten Sidoarjo memberikan ancaman terhadap potensi bencana pencemaran lingkungan dan kegagalan teknologi;
- f. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo;
- g. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk puting beliung, rob (air pasang), banjir dan kekeringan khususnya penyediaan air bersih.

2) Peluang / Opportunity

- a. Banyaknya industri/dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo sehingga terdapat peluang untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- b. Adanya dukungan dana APBN dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya dukungan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Adanya dukungan sarana prasarana PMK di dunia usaha / industri di Kabupaten Sidoarjo;
- e. Pesatnya dan dukungan kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Potensi dan permasalahan bencana lumpur memberikan peluang bagi pengembangan BPBD yang lebih baik ke depan

B. Faktor Internal Organisasi

1) Kelemahan / Weakness

- a. Alokasi anggaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih banyak terserap untuk PMK, sedangkan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi masih belum mencukupi;

- b. Belum terjalinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga /OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;
- c. Proporsi pegawai /SDM masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas;
- d. Masih terbatasnya jumlah posko Pemadam Kebakaran;
- e. Masih terbatasnya sarana prasarana/peralatan penunjang kebencanaan termasuk kebakaran;
- f. Sosialisasi keberadaan BPBD masih perlu ditingkatkan, terkait dengan tupoksi;
- g. Pelatihan-Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih lemah;
- h. Kotak fungsi perencanaan dan pelaporan BPBD tidak termasuk struktur tersendiri dalam BPBD

2) Kekuatan

- a. BPBD Kabupaten Sidoarjo secara legalitas sudah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang tercantum pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Tersedianya alokasi anggaran Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penyelamatan dari APBD;
- d. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai dasar Kelembagaan dan kegiatan operasional BPBD;
- e. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (1);
- f. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan

- i. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota
- j. Dimasukkannya pemadam kebakaran menjadi salah satu organisasi dan bidang dibawah koordinasi BPBD, sehingga mempercepat koordinasi apabila terjadi bencana kebakaran;
- k. Dukungan anggaran APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Progam Rehabilitasi dan Rekonstruksi (bantuan sosial berpola hibah);
- l. Adanya kerjasama dengan kelompok relawan lokal;
- m. Adanya kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha

Hasil dari identifikasi terhadap butir-butir TOWS di atas, menunjukkan bahwa Ancaman dan Peluang yang dihadapi serta Kelemahan dan Kekuatan yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidoarjo, dapat dirangkum kedalam 3 (tiga) bidang kegiatan sesuai kompetensi sebagai berikut.

1. **Bidang Tugas dan Fungsi;** yang dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan/ketentuan tentang BPBD
2. **Bidang Sarana Prasarana :** yang termasuk di dalam kelompok ini antara lain : Sumberdaya Manusia sebagai aset, Infrastruktur yang dimiliki (*Hardware dan Software*) Peralatan pendukung tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya lain yang diperlukan.
3. **Bidang Administrasi dan Pengawasan :** adalah seluruh aktivitas penunjang organisasi BPBD di bidang administrasi, keuangan, pelaporan dan pengukuran kinerja serta pengawasan.

Dari pengelompokan kompetensi kegiatan tersebut secara menyeluruh dilakukan identifikasi ulang butir TOWS sebagai berikut.

1) **Ancaman (*Threat*)**

a. **Bidang Tugas dan Fungsi BPBD**

1. Topografi dan geografi Kabupaten Sidoarjo sebagian besar luasnya adalah wilayah daratan dengan potensi resiko bencana pandemi covid-19, banjir dan kekeringan.
2. Jumlah penduduk, tingkat kepadatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo relatif padat dan heterogeny menambah tingkat kerentanan terhadap bencana

3. Tingkat pendidikan dan ketergantungan mata pencaharian masyarakat di bidang industri, pertanian dan birokrat
4. Kesenjangan tingkat kesejahteraan perlu perhatian dan peningkatan

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Kebijakan untuk penambahan pos-pos PMK dan kelengkapan peralatannya belum optimal
2. Sumber dana untuk membiayai program, kegiatan dan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana terbatas
3. Hardware dan software teknologi informasi kebencanaan belum terpenuhi sesuai kebutuhan dan belum dimiliki secara lengkap.

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Sistem administrasi keuangan, pelaporan, dan penilaian kinerja organisasi belum baku
2. Fungsi pengawasan dan pemeriksa belum terakomodasi baik

2) Peluang (Opportunities)

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Makro & mikro ekonomi regional dan nasional mendukung
2. Berpengalaman dalam pengelolaan dan layanan bencana bidang pemadam kebakaran
3. Stabilitas keamanan, sosial dan politik regional baik/stabil

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Pengembangan Layanan PMK ke kawasan industri
2. Dukungan pemerintah kabupaten cukup baik
3. Dikenal luas masyarakat dan dunia usaha dan mampu bekerjasama
4. Besarnya jumlah penduduk merupakan potensi pendukung tugas
5. Infrastruktur cukup lengkap di wilayah Kabupaten Sidoarjo

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Adanya dukungan dari OPD lain untuk bekerja sama
2. Badan Pemeriksa dan Pengawas OPD berfungsi di Kabupaten
3. SDM berpengalaman di bidang administrasi dan layanan publik

3) Kelemahan (Weakness)

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Belum masuknya urusan wajib untuk urusan penanggulangan bencana dan kebakaran;
2. Kinerja kegiatan belum optimal dan teruji di bidang kebencanaan
3. Kompetensi SDM kurang kuat dan perlu peningkatan kualitas
4. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan masih perlu peningkatan
5. Sumber Pendanaan terbatas

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Inventarisasi dan Pengelolaan aset perlu dibenahi
2. Gedung kantor dan gudang kurang mendukung kegiatan organisasi
3. Pemeliharaan dan cek kesiapsiagaan peralatan perlu ditingkatkan
4. Belum sempurnanya aplikasi Sidoarjo Tanggap (SIGAP)

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Cek dan recek pengelolaan keuangan dan logistik perlu ditingkatkan
2. Pola penyampaian informasi kepada masyarakat belum baik

4) Kekuatan (Strenght)

a. Bidang Tugas dan Fungsi

1. Merupakan organisasi yang harus ada sesuai undang-undang
2. Struktur, unsur organisasi dan program kegiatan mampu berkembang
3. Merupakan OPD Pendukung/Penunjang Pemerintahan Daerah

b. Bidang Sarana Prasarana

1. Kantor dan kelengkapan sarana prasarana mendukung
2. Yuridis formal organisasi kuat dan lengkap
3. Dikenal di seluruh pelosok Desa/Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
4. Infrastruktur memadai dan mudah dijangkau di setiap wilayah kabupaten

c. Bidang Administrasi dan Pengawasan

1. Adanya Badan Pemeriksa dan Inspektorat Kabupaten
2. Adanya pembinaan dari kementerian dan Badan terkait

Berdasar uraian di atas diasumsikan hasil identifikasi butir TOWS sesuai dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Sidoarjo, untuk itu dilakukan pemberian Nilai (**Scoring**) dan Bobot (**Weighting**) terhadap butir TOWS dengan pendekatan menggunakan model *Analytical Hierrarchy Process* (AHP), di mana di setiap butir TOWS diberi **Nilai 1 (Satu)**, dan di **Bobot** (dalam %) yang penetetapannya didasarkan kepada seberapa besar/kuat

peranan dan atau pengaruh dari masing-masing bidang terhadap lingkungan organisasi, sebagai berikut.

1. Bidang Tugas dan Fungsi diberi bobot 35 %
2. Bidang Sarana Prasarana diberi bobot 40 %
3. Bidang Administrasi dan Pengawasan diberi bobot 25 %

Kemudian dilakukan perhitungan per bidang dengan cara sebagai berikut : **Nilai X Bobot** dari masing-masing butir TOWS, sedang untuk melihat posisi dan keberadaan organisasi merupakan hasil dari : **(Peluang - Ancaman)** dan **(Kekuatan -Kelemahan)**, dengan rangkuman hasil sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Hasil Perhitungan dan Pengukuran Analisis TOWS

Butir-Butir	Nilai	Bobot	Hasil
Ancaman (T)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	5,00	0,35	1,75
b. Bidang Sarana Prasarana			
c. Bidang Adm. &Pengawasan	4,00	0,40	1,60
	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Ancaman			3,85
Peluang (O)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana			
c. Bidang Adm. &Pengawasan	5,00	0,40	2,00
	3,00	0,25	0,75
Nilai Kelompok Peluang			3,80
Nilai Eksternal			(0,05)
Kelemahan (W)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	4,00	0,35	1,40
b. Bidang Sarana Prasarana			
c. Bidang Adm. &Pengawasan	3,00	0,40	1,20
	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Kelemahan			3,10

Kekuatan (S)			
a. Bidang Tugas dan Fungsi	3,00	0,35	1,05
b. Bidang Sarana Prasarana	4,00	0,40	1,60
c. Bidang Adm. &Pengawasan	2,00	0,25	0,50
Nilai Kelompok Kekuatan			3,15
Nilai Internal			0,05

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo, dihadapkan pada lingkungan Eksternal dan Internal organisasi berada di Kuadran (-0,05 ; +0,05) yang dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS *Analysis* Di mana dari gambar diagram diketahui keberadaan dan posisi BPBD Kabupaten Sidoarjo, merupakan kuadran **Negatif** dan **Positif**, yakni **kuadran Stabilitas (Stability)**. Artinya untuk saat ini BPBD Kabupaten Sidoarjo, sebagai organisasi yang relatif baru, posisinya berada dalam kondisi **Stabil** karena **Kekuatannya** masih relatif lebih besar dari **Kelemahan** yang dimiliki, sedang **Ancaman** yang dihadapi tampaknya juga lebih besar dibanding **Peluang**-nya.

Kondisi dan posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan ke dalam diagram TOWS sebagai berikut.

Gambar 2. 2 Diagram Hasil Analisis TOWS (SWOT)



Gambar diagram TOWS tersebut di atas juga menunjukkan bahwa ;Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan **kuadran Stability**. Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang searah dengan kondisi dan posisi organisasi saat ini yakni : Kebijakan yang bersifat penataan, perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara selektif (*Selective Maintenance*) dan perbaikan, rekonstruksi, dan koordinasi secara cepat (*Agresive Maintenance*) ke arah **Sinergitas** dalam pelaksanaan kegiatan dan implementasi program-program yang direncanakan. Baik dalam upaya untuk pengembangan organisasi maupun diversifikasi ke arah pelayanan publik yang semakin baik/prima, agar di masa mendatang dapat dicapai posisi organisasi BPBD Kabupaten Sidoarjo pada Kuadrani Bertumbuh (*Growth*)

1. Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian / Lembaga

Telaah sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilakukan untuk mengetahui kesinambungan antara indikator kinerja yang ada dan berkontribusi terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. 11 Perbandingan Sasaran Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Sidoarjo	Sasaran pada Renstra BNPB Tahun 2020-2024
1.	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana

Tabel 2. 12 Perbandingan Sasaran Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No	Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Sidoarjo	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2020-2024
1.	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

2.	Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
----	--	---

2. Hasil Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Tabel 2. 13 Perbandingan Sasaran Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja BPBD Kab. Sidoarjo	Sasaran pada Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah
No	Indikator Kinerja BPBD Kab. Sidoarjo	Sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
2	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur
3.	Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur

Berdasarkan hasil telaahan terhadap sasaran Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1.) Tantangan

- a. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh pada tingkat kerentanan warga terhadap bencana;

- b. Bencana lumpur sidoarjo berdampak pada keterbatasan kewenangan BPBD Sidoarjo dalam menanggulangi lumpur sidoarjo;
- c. Cakupan wilayah yang berpotensi kebakaran cukup luas dan tidak sebanding dengan sarana prasarana yang dimiliki;
- d. Banyaknya industri di Kabupaten Sidoarjo memberikan ancaman terhadap potensi bencana pencemaran lingkungan dan kegagalan teknologi;
- e. Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo;
- f. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk puting beliung, rob (air pasang), banjir dan kekeringan khususnya penyediaan air bersih.

2.) Peluang

- a. Banyaknya industri/dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo sehingga terdapat peluang untuk CSR (Coorporate Social Responsibilities);
- b. Adanya dukungan dana APBN dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya dukungan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Adanya dukungan sarana prasarana PMK di dunia usaha / industri di Kabupaten Sidoarjo;
- e. Pesatnya dan dukungan kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Potensi dan permasalahan bencana lumpur memberikan peluang bagi pengembangan BPBD yang lebih baik ke depan

3. Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Kabupaten Sidoarjo berkembang menjadi wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah Jawa Bali (termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo) sebagai pusat pengembangan utama sentra pangan nasional, pengembangan sumberdaya alam yang hemat ruang (intensif) terutama perikanan tangkap darat, perkebunan dengan agrotourism, pertambangan migas dan non migas, pengembangan industri pengolahan yang hemat ruang dan air serta ramah lingkungan, pengembangan permukiman yang terkendali, pusat pertumbuhan utama ekonomi dan pintu gerbang utama global dan nasional termasuk pelayanan pemerintahan nasional. Kawasan ekonomi Potensial di Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan dalam RTRW Propinsi adalah Kapuk (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi). Berikut merupakan isu strategis terkait Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 2. 14 Hasil Analisis terhadap telaahan dokumen RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Adanya dampak luapan lumpur lapindo di Kecamatan Porong dan Tanggulangin yang secara tidak langsung mengubah tata guna lahan dan struktur ruang Kabupaten Sidoarjo	Belum optimalnya pengelolaan area terdampak lumpur Sidoarjo	Pengaliran lumpur ke Kali Porong menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan	BPBD mendorong untuk peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yaitu DLHK dan BPLS

4. Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Strategis Kabupaten Sidoarjo

Tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu sasaran dan arah kebijakan startegis penanggulangan bencana dan kebakaran diharapkan dapat menimbulkan dampak yang positif terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan agar tetap stabil dan seimbang.

Tabel 2. 15 Hasil Analisis terhadap Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman industri perdagangan jasa transportasi (Pencemaran)	Semakin banyaknya jumlah kegiatan usaha yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban sungai semakin menurun sehingga perlu kajian daya dukung dan daya tampung beban pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi • Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai 	BPBD berkoordinasi dan melakukan sinergi dengan OPD terkait yaitu DLHK dan BPLS
		Perlunya meninjau kembali waktu dan tempat pelaksanaan uji kualitas udara ambien	Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten	Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan uji kualitas udara ambien
		Perlunya meninjau kembali titik pantau uji kualitas Air Badan Air di sungai (Afvour dan Kanal)	Kurangnya informasi data usaha/ kegiatan yang berada di sekitar sungai (Afvour dan Kanal) - Kualitas air sungai Kab. Sidoarjo masih belum memenuhi target penurunan konsentrasi BOD	Meningkatnya koordinasi antara BPBD dengan instansi dalam penentuan titik pantau

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Perlunya peningkatan pengawasan seiring dengan pertumbuhan industri yang semakin pesat	Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum ada jabatan fungsional Bidang Lingkungan Hidup	Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah - Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta berbagai sektor instansi terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profesional	Terkadang pengaduan yang diajukan lebih pada permasalahan sosial dibanding permasalahan pencemaran lingkungan	BPBD meningkatkan koordinasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan PD/instansi terkait, pelaku usaha, LSM dan masyarakat
2	Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak	Informasi keberadaan RTH di Kab. Sidoarjo yang jauh dari proporsi ideal sehingga perlu kajian atau inventarisasi RTH	Kurang tegasnya PD/instansi penanggung jawab pengelolaan RTH di Kab. Sidoarjo	Adanya Masterplan RTH Kab. Sidoarjo

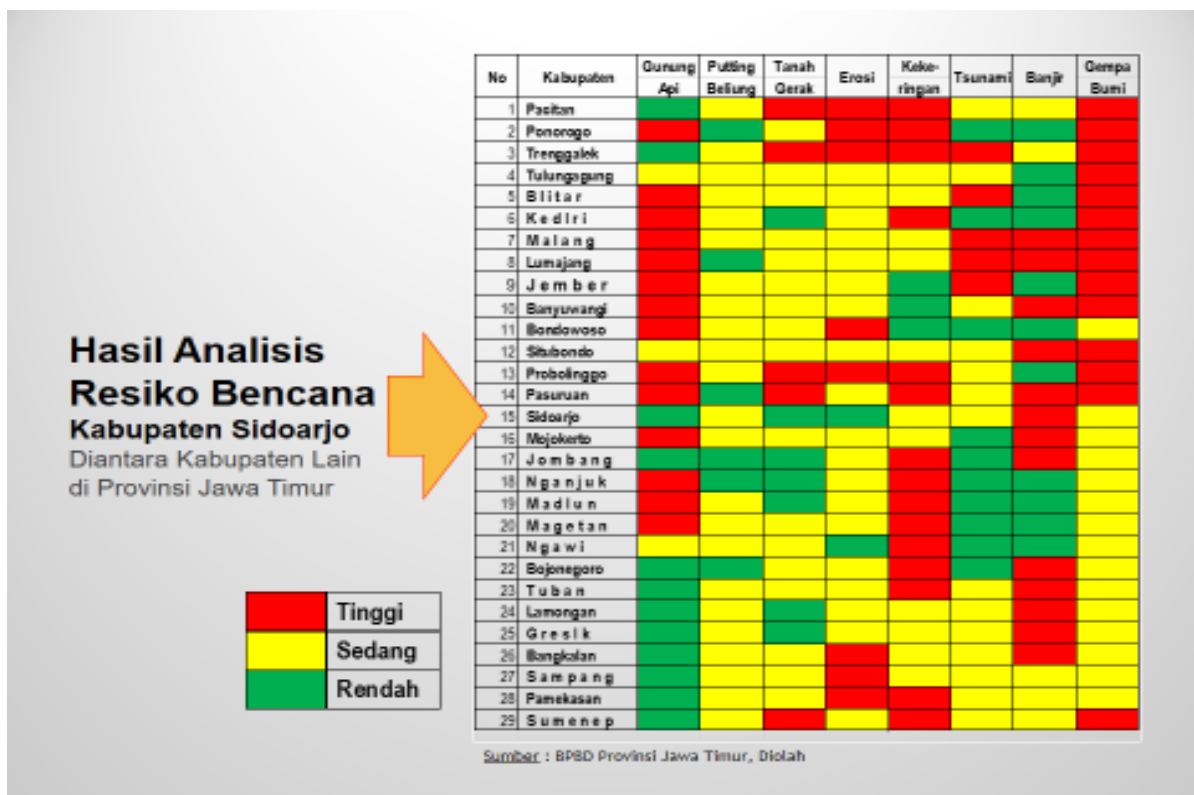
No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	memenuhi ketentuan teknis	Semakin tingginya potensi kerusakan lahan/tanah kering di Kab. Sidoarjo	Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (permukiman, industri, perdagangan/jasa, transportasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Sidoarjo lebih selektif terhadap persetujuan pemanfaatan ruang dan izin lokasi • Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti tercantum dalam Perda RTRW 2009- 2029
		Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan teknis (Tata ruang)	Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang	Peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo
3	Sampah/Limbah B3, Air tanah, Kualitas permukiman/ Kawasan Pesisir, Air Sungai dan air Baku, kualitas udara	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman, industri, perdagangan, jasa, transportasi (Pencemaran)	Semakin bertambahnya pemukiman dan industri	Peningkatan jumlah TPA dan Sarana prasarana pengelolaan sampah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN SIDOARJO

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi rawan bencana dan resiko bencana dari setiap jenis bencana yang ada, diketahui berdasarkan tingkat kerawanan bencananya sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Kondisi Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo



Data di atas menunjukkan bahwa resiko bencana, khususnya untuk 8 (delapan) jenis bencana alam, tingkat Resiko Tinggi (Merah) di Kabupaten Sidoarjo ada pada ancaman bencana Banjir, sedang untuk ancaman bencana lainnya yang berada pada tingkat Sedang (Kuning) adalah ; Puting beliung, Kekeringan, Tsunami dan Gempa Bumi, dan untuk ancaman bencana pada tingkat resiko Rendah (Hijau) ada di bencana ; Gunung Api, Tanah gerak dan Erosi. Di pihak lain, dengan kepadatan penduduk dan banyaknya kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo, diduga masalah kebakaran dan kegagalan teknologi juga berpotensi menimbulkan resiko.

Selanjutnya merujuk pada dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024, bahwa sejumlah isu strategis kebencanaan, antara lain adalah meningkatnya Risiko Bencana Geologi yang ditandai dengan **makin meningkatnya kejadian gempa bumi sejak 2013**. Indonesia adalah wilayah yang terletak di pada jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar- sesar aktif di daratan. Segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa di atas skala magnitudo 6,5 diidentifikasi mencapai 295 sesar. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya guncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar.

Frekuensi gempa bumi dengan magnitudo kurang dari magnitudo 5 juga relatif tinggi. Meskipun dengan magnitudo yang kecil, namun bila terjadi pada jalur sesar aktif di kedalaman yang dangkal maka gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan catatan BMKG, rata-rata dampak kejadian gempabumi dalam satu tahun dapat disimpulkan sebagai berikut: (i) gempa dalam berbagai magnitudo sebanyak sekitar 5.000-6.000 kali; (ii) Gempa signifikan berkekuatan $M > 5,0$ sebanyak 250-350 kali; (iii) Gempa merusak terjadi sebanyak sekitar 8-10 kali; (iv) dalam 2 tahun gempa berpotensi tsunami terjadi 1 kali.

Disii lain potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim mengalami peningkatan yang dibarengi dengan peningkatan jumlah DAS kritis akibat tingginya degradasi dan sedimentasi DAS. Adapun berdasarkan catatan Direktorat PEPDAS – PDASHL, pada 2018 dari total 17.076 DAS, terdapat setidaknya 2.145 DAS kritis yang dipulihkan, setengahnya terdapat di kawasan pulau Sulawesi dan Maluku. Terdapat 15 DAS prioritas nasional untuk direhabilitasi. DAS Prioritas tersebut adalah DAS Asahan Toba, Siak, Musi, Sekampung, Ciliwung, Cisadane, Citarum, Serayu, Solo, Brantas, Kapuas, Moyo, Limboto, Saddang, dan Jeneberang. Sedangkan dari 6 (enam) gugusan pulau-pulau besar di Indonesia, hanya Kalimantan dan Papua yang mengalami surplus dalam tata kelola air, sementara Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara cenderung mengalami defisit dan krisis dalam tata kelola air. Laju sedimentasi di negara-negara tropis basah seperti Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan curah hujan rendah. Laju erosi yang tinggi akibat curah hujan juga berakibat pada bentang alam Indonesia yang rentan terhadap degradasi lahan. Kerugian ekonomi akibat erosi di Pulau Jawa saja mencapai USD 400 juta setiap tahunnya. Kondisi ini juga mendatangkan potensi masalah ketersediaan air minum di masa depan karena tingginya laju

sedimentasi serta tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Aspek tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah saat ini juga mengemuka sebagai isu-isu strategis kebencanaan. Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp54,670 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk prabencana sebesar Rp32,370 triliun, penanganan darurat bencana sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp9,33 triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundangan, kerangka kelembagaan dan berbagai skema inovasi pembiayaan yang menasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana (penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi).

Selain dari kontribusi APBN/APBD, pendanaan dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan pooling fund dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan. b) Perencanaan Penanggulangan Bencana belum optimal digunakan sebagai acuan dalam menurunkan risiko bencana. Di tingkat daerah, RPB terkadang belum terintegrasi dengan RPJMD dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah. Oleh karena itu, kajian perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami. Penguatan kerja sama dan tata kelola bencana di daerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih, melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan

mekanisme kerja sama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Kerja Sama antar daerah wajib bagi daerah yang mempunyai potensi kejadian bencana lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Inisiasi dan penguatan kerja sama daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Terkait dengan pandemic Covid-19, maka isu-isu terkait dengan adaptasi kebiasaan baru yang aman dan produktif sebagai fase transisi darurat ke pemulihan darurat bencana non-alam covid-19 menjadi salah focus penanggulangan bencana ke depan. Sektor-sektor PDB terdampak Covid-19 membutuhkan perlindungan dan insentif untuk memacu perbaikan pertumbuhan ekonomi negara pasca krisis. Perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi terdampak perlu dilakukan melalui pemberian stimulus ekonomi, baik untuk sektor ekonomi formal maupun informal. Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi skema dan kebijakan keuangan, termasuk subsidi pajak, listrik dan komunikasi bagi sektor komersil, serta pemberian stimulus ekonomi dan bantuan sosial bagi sektor ekonomi informal dan masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar perekonomian dapat tetap tumbuh di masa pandemi.

Untuk menjaga perputaran sektor logistik, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan perlindungan dan optimalisasi terhadap sektor-sektor dalam negeri yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pertanian, perusahaan pakan ternak, pemotongan dan pengolahan daging untuk melanjutkan operasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri. Perlindungan dan insentif perekonomian tersebut perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya penurunan kerentanan sosial ekonomi dan berfokus pada masyarakat di daerah rawan bencana, terutama kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak.

Adanya hambatan (seperti kesenjangan digital, kesatuan informasi, dsb,) pada proses komunikasi risiko hingga menyulitkan masyarakat untuk bersikap menghadapi Covid-19. Komunikasi risiko perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Pola komunikasi risiko yang dikembangkan perlu memperhatikan kesatuan informasi, perubahan gaya hidup, dan kesenjangan digital yang ada di masyarakat. Kualitas komunikasi risiko tidak hanya dinilai dari keteraturan penyampaian informasi,

namun juga dari sejauh mana informasi yang diterima mampu menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat. Efektivitas komunikasi risiko ditentukan oleh siapa yang menyampaikan pesan, bentuk pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, serta target penerima pesan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki jarak perbedaan budaya dan karakteristik masyarakat yang lebar, maka jarak perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam membangun komunikasi risiko. Dalam suatu masyarakat memiliki jarak perbedaan yang lebar, pesan yang sama dan dengan saluran komunikasi yang samadapat dimaknai berbeda, oleh karena itu pemilihan informasi, pola, dan saluran penyebaran informasi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas komunikasi risiko.

Adapun isu strategis lainnya yang menjadi perhatian saat ini adalah **reformasi elemen sistem penanggulangan bencana**. Antara lain terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memasuki tahap pembahasan di legislatif. Terdapat beberapa kemungkinan perubahan yang berpotensi merubah format penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, RENAS PB perlu memberikan ruang penyesuaian jika nanti Undang-undang yang baru telah diberlakukan.

Untuk itu maka perlu dilaksanakannya Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi bencana non alam skala besar. Pandemi Covid-19 direspon oleh pemerintah dengan melakukan Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana. Reformasi sistem diarahkan kepada peningkatan kemampuan negara khususnya dalam menghadapi bencana non-alam skala besar. Untuk mendukung upaya reformasi tersebut, maka juga dilakukan reformasi terhadap sistem-sistem pendukung lain yang mempengaruhi optimalitas sistem ketahanan bencana nasional, yaitu antara lain: (i) Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana; (ii) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; dan (iii) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

Dengan demikian pemerintah dituntut untuk menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana bagi seluruh kabupaten/kota. SPM Sub Urusan Bencana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ditetapkannya peraturan

tersebut, maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah. Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM disebutkan bahwa Tahapan Penerapan SPM adalah pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tahap yang krusial adalah pengumpulan data tematik kebencanaan. Data ini perlu disiapkan daerah secara detail untuk memetakan target layanan, seperti data individu warga negara, data individu aparat dan petugas, data sarana prasarana dan data kejadian bencana untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Pengumpulan data ini perlu didukung oleh seluruh pihak khususnya kementerian/lembaga terkait.

Sejumlah isu strategis lainnya yang masih relevan untuk mendapat atensi adalah 2 (dua) isu pokok tentang Pengurangan Risiko Bencana, yaitu : (1) belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, dan (2) masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dipihak lain, integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan Pembangunan masih terkendala oleh beberapa hal, antara lain kesenjangan persepsi masyarakat maupun aparat pemerintah tentang pengurangan risiko, yang selama ini pemahamannya masih sebatas pada tanggap darurat, kurangnya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada stakeholder dan keterbatasan kapasitas baik kelembagaan, SDM dan pendanaan dalam pengurangan risiko bencana.

Disamping itu beberapa isu strategis kebencanaan yang juga perlu dicermati sebagai bagian dalam implementasi program-program penanggulangan bencana adalah : (i) **kolaborasi pentahelix** dengan menambahkan unsur akademisi & media (belakangan muncul gagasan konsep Hexa Helix dengan menambahkan unsur affected communities); (ii) **Isu-isu tatakelola kebencanaan yang terkadang terhambat sinergitas antara perangkat daerah** dengan fleksibilitas peran yang rendah dan perlunya membangun model tatakelola kolaboratif (collaborative governance); (iii) **Isu-isu kapasitas lokal** masih perlu mendapat atensi yang lebih secara substantif dengan menggandeng berbagi pihak, termasuk melibatkan perguruan tinggi di tingkat daerah / lokal; (iv) **Isu lingkungan** yang boleh jadi secara mayoritas adalah man-made disaster, seperti penebangan pohon yang masif, pencemaran sungai,

hingga Indonesia menjadi negara pencemar sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia; (v) dalam hal **pendanaan khususnya dari sisi pemulihan pasca bencana**, perlunya keseimbangan (secara proporsional) antara pemulihan fisik dan pemulihan sosial ekonomi sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan fisik semata; (vii) dukungan **edukasi kebencanaan harus terus didorong** bukan saja sebatas materi suplemen namun perlu masuk dalam kurikulum. Dalam implementasinya tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ke dalam kurikulum.

Dengan merujuk pada sejumlah isu-isu strategis diatas, maka point of view terhadap kebijakan penanggulangan bencana dapat dilihat dari perpektif yang berbeda, antara lain : (i) bahwa pemahaman visi dan makna tentang kemandirian **masyarakat korban bencana bukanlah orang yang sama sekali "tidak berdaya"**, akan tapi hanya perlu leverage atau daya ungkit yang tepat sehingga mereka dapat berdaya dalam melakukan dan atau me-manage risiko bencana yang ada di wilayahnya; (ii) dengan adanya dukungan IT seperti aplikasi Ina-Risk dan konsep tentang filosofi Wei-Ji (ada bahaya / dangerous tapi juga sekaligus ada peluang / opportunity) maka bencana adalah bagian dari pembangunan yang diposisikan sebagai tantangan dan atau drive force pembangunan, bukan faktor eksternal yang menghambat dan selalu berkonotasi dengan force major; (iii) melakukan revitalisasi "budaya lokal" yang dinamis khususnya pada masyarakat di Jawa Timur yang memiliki kekayaan budaya lokal yang beragam namun perlu dipadukan dengan Internet of Things (IoT); (iv) memberi peran yang proper atau memadai bagi kiprah perempuan dalam program-program PRB khususnya pada level komunitas (misal :Srikandi Tangguh). Perempuan dan jejaringnya dapat dimanfaatkan sebagai agen-agen PRB di komunitasnya dalam rangka memberikan literasi dan pembelajaran tentang penanggulangan bencana; dan (v) melihat potensi bencana yang ada sudah sepatutnya program asuransi bencana menjadi pilihan strategis dan teranggarkan. Oleh karena sampai dengan saat ini, penanganan akibat dari bencana sebagian besar masih menjadi tanggung jawab pemerintah. sudah seharusnya melakukan risk-sharing dengan pihak swasta, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah.

Adapun yang terkait dengan bencana kebakaran, maka isu-isu strategis yang mengedepan adalah yang berhubungan dengan metode optimasi lokasi pemadaman agar mendapatkan lokasi lokasi pos pemadam kebakaran yang tepat sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan penanganan kejadian kebakaran. Diharapkan metode ini dapat meminimalkan

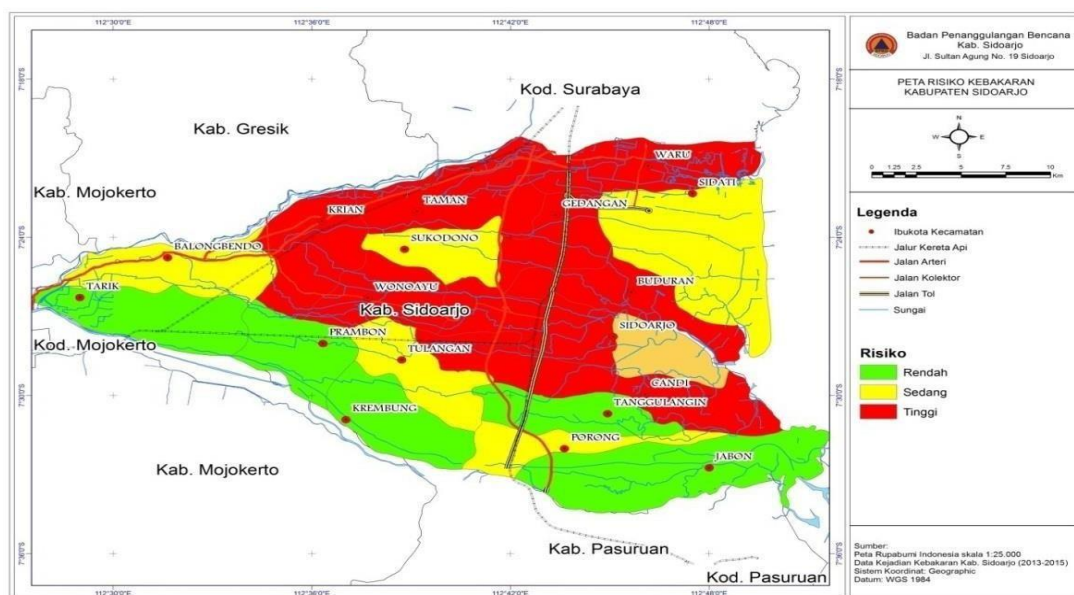
dampak atau kerugian yang ditimbulkan baik korban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur publik, dan bangunan fisik lainnya. Untuk mengkaji model tersebut, Kabupaten Sidoarjo, sebagai kabupaten yang sedang berkembang dalam bidang pembangunan namun memiliki berbagai masalah terkait dengan bencana seperti kebakaran. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran dan memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru bagi wilayah yang belum terjangkau oleh pos pemadam kebakaran yang sudah ada. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko kebakaran
- 2) Mengidentifikasi jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran eksisting
- 3) Mengidentifikasi tingkat aksesibilitas jaringan jalan.
- 4) Mengidentifikasi sumber air.
- 5) Memberikan arahan rekomendasi lokasi pos pemadam kebakaran yang baru

1) Identifikasi Resiko Bencana Kebakaran

Berdasarkan analisis risiko kebakaran yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa risiko kebakaran di kabupaten sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Peta Risiko Kebakaran Kabupaten Sidoarjo (Kajian Tahun 2015)



Dari peta risiko kebakaran dapat di jelaskan bahwa kawasan/ wilayah yang berisiko tinggi terhadap bahaya kebakaran adalah di kawasan yang padat pemukiman, kawasan industri dan pertokoan.

Berdasar hasil survey data baik data primer maupun sekunder, menyatakan bahwa luas Kabupaten Sidoarjo adalah 71.427,00 Ha hektar, dengan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

1. 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berairasin/payau berada di belahan timur seluas 27.011,25 Ha atau 37,82%
2. 3-10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%
3. 10-25 meter terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha atau 25,95%

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2021 sebesar 2.064.170 jiwa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) yaitu 2.282.220 jiwa. Penurunan ini patut diduga bahwa dari data Sensus Penduduk 2021 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, 21 Januari 2021, dari jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo terdapat sebesar 12.6% atau 262.4 ribu jiwa, masih ber KTP luar kota dan karena pandemic yang berlangsung hampir dua tahun ada kemungkinan penduduk yang ber KTP non Sidoarjo menuju domisilinya. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 209.510 jiwa, sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 57.183 jiwa.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk dan luasan per Kecamatan

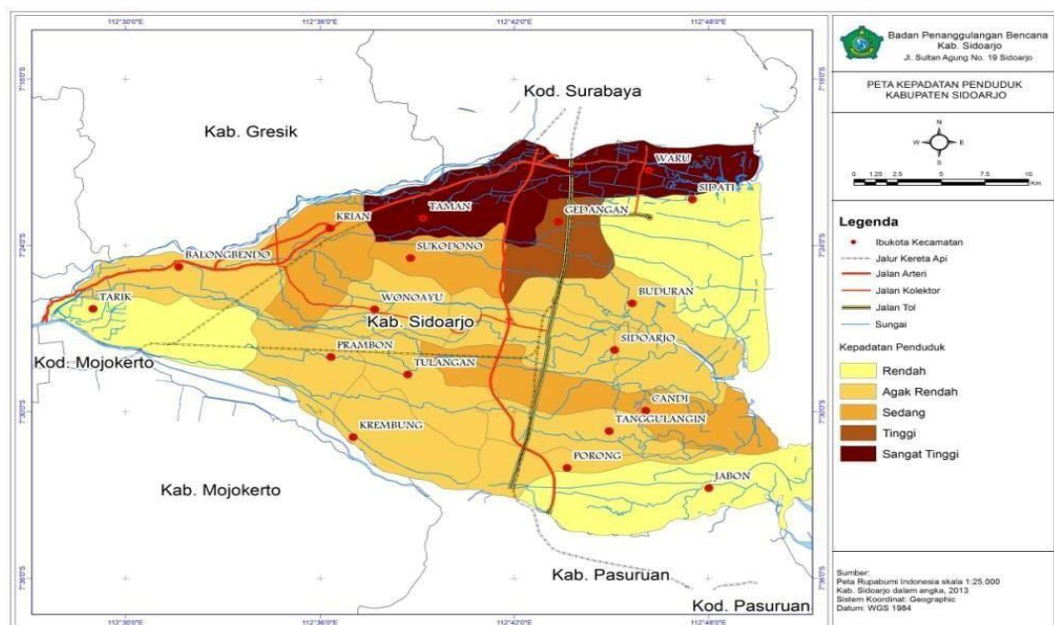
Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Jumlah		
	2019	2020	2021
Tarik	72 206	69 189	69 970
Prambon	85 157	79 952	80 959
Krembung	75 731	69 887	70 956
Porong	85 700	73 446	74 290
Jabon	61 092	56 266	57 183
Tanggulangin	106 685	89 804	91 119
Candi	168 779	153 423	156 451

Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Jumlah		
	2019	2020	2021
Tulangan	107 683	102 339	104 407
Wonoayu	90 794	85 586	87 278
Sukodono	132 644	121 859	124 734
Sidoarjo	228 713	201 115	204 441
Buduran	108 457	98 710	100 296
Sedati	111 788	96 636	98 246
Waru	240 674	200 754	201 920
Gedangan	134 787	120 003	121 501
Taman	235 238	207 815	209 510
Krian	140 183	130 930	134 051
Balongsendo	80 222	76 050	76 856
Total Kabupaten Sidoarjo	2 266 533	2 033 764	2 064 168

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hasil Registrasi Penduduk (De Jure)

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2022 (BPS Kabupaten Sidoarjo)

Gambar 3.2 Peta Tingkat Kepadatan Penduduk



1) Identifikasi Jangkauan Pelayanan Pos Pemadam Kebakaran Eksisting

Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran perkotaan setiap kota wajib memiliki pos pemadam kebakaran agar terlindungi dari resiko bencana kebakaran perkotaan. Lokasi Pos pemadam kebakaran dapat mempengaruhi skala pelayanan terhadap cepat tanggap petugas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi terjadinya bencana kebakaran. Semakin jauh lokasi pos pemadam kebakaran maka semakin besarpula jarak yang harus ditempuh petugas pemadam kebakaran. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat. Apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakarapun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut (KEPMEN PU no.11/kpts/2000).

Jangkauan pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Response time) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Cepat tanggap 15 menit petugas pemadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan (dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

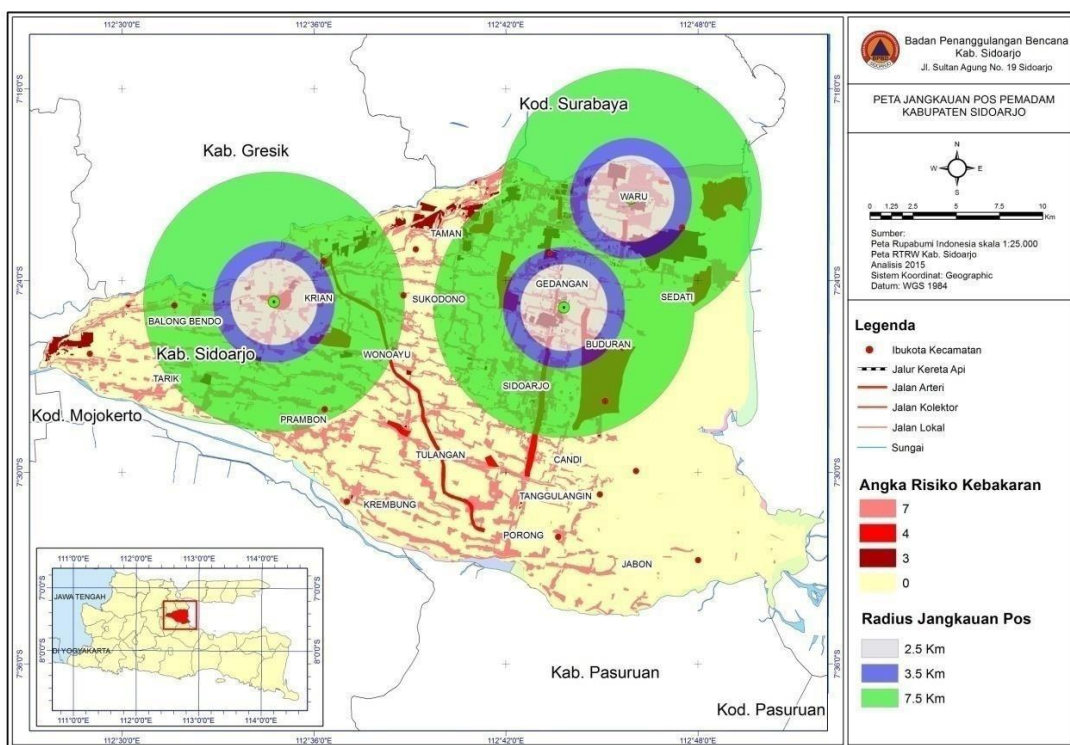
Standar perletakan pos pemadam kebakaran dalam skala kota:

1. Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulaan kebakaran di perkotaan, yaitu:
 - a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
 - b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.

2. Berdasarkan standar ISO (Insurance Service Office) Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu:
 - a. Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan
 - b. Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan
 - c. Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran

Untuk Kabupaten Sidoarjo saat ini jangkauan pelayanan pemadam kebakaran dalam gambar berikut :

Gambar 3.3 Peta jangkauan Layanan Pos Pemadam Kebakaran



3) Identifikasi Tingkat Aksesibilitas Jaringan Jalan

Skala pelayanan pos pemadam kebakaran merupakan faktor penting karena terkait oleh waktu tempuh dalam penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan KEPMEN PU no.11/kpts/2000: Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (Responsetime) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Pos pemadam kebakaran sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan bencana kebakaran harus memenuhi waktu tempuh pelayanan cepat tanggap penanggulangan bencana kebakaran maksimal sebesar 15 menit. Cepat tanggap 15 menit yang dimaksud merupakan waktu maksimal petugas pemadam kebakaran

dari tahap awal sampai dengan gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran.

Cepat tanggap 15 menit petugas pemadam kebakaran terbagi atas 3 tahap, 5 menit pertama merupakan tahap persiapan, 5 menit kedua merupakan tahap perjalanan(dari pos menuju lokasi kejadian kebakaran), tahap ketiga merupakan tahap gelar peralatan di lokasi kejadian kebakaran. Untuk itu di perlukan analisis aksesibilitas jaringan jalan agar dapat ditentukan jalan yang akan di lalui ketika terjadi kebakaran di suatu tempat. Aspek aksesibilitasnya terdiri dari jarak tempuh, kecepatan tempuh dan waktu tempuh. Berdasarkan rumus matematika berikut dapat di tentukan nilai kecepatan, waktu tempuh dan jaraknya.

Rumus :
$$v = \frac{s}{t}$$

Dengan ketentuan:

□ s = Jarak yang ditempuh (m, km)

□ v = Kecepatan (km/jam, m/s)

□ t = Waktu tempuh

(jam,sekon) Catatan:

1. Untuk mencari jarak yang ditempuh, rumusnya adalah $s = v \times t$
2. Untuk mencari waktu tempuh, rumusnya adalah

$$t = \frac{s}{v}$$

3. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah $v = \frac{s}{t}$

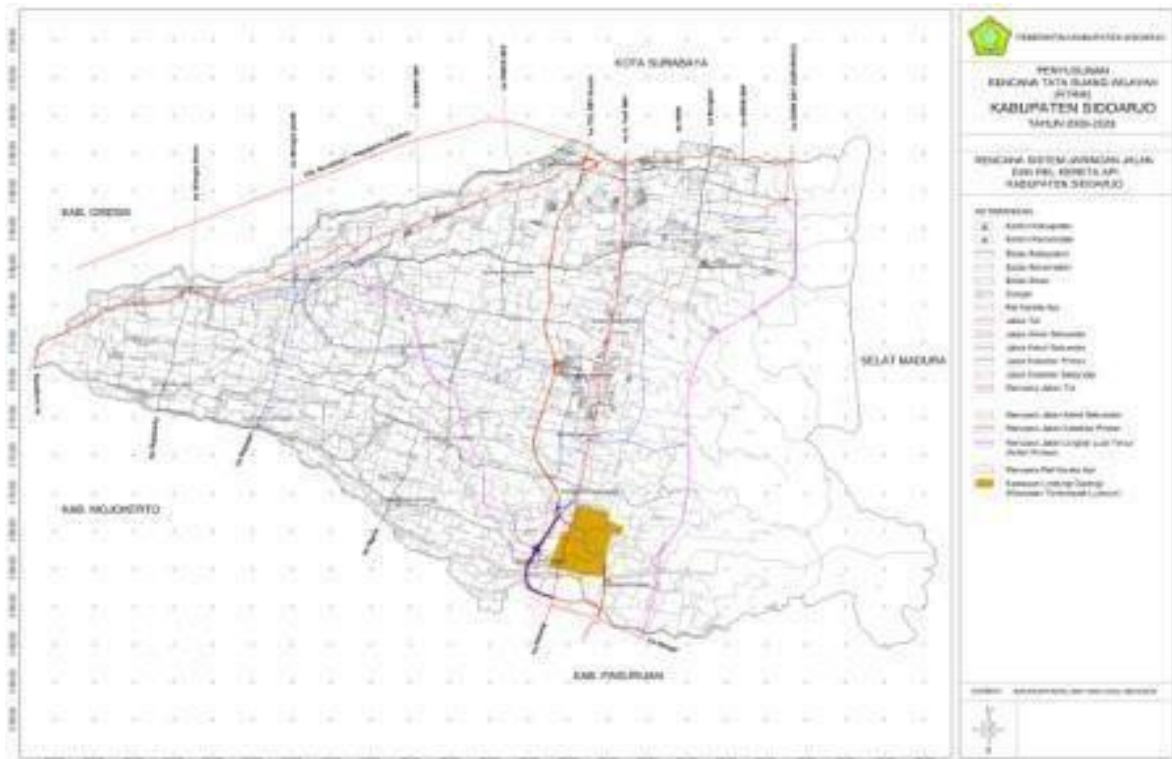
Kecepatan tempuh pada ruas jalan yang memiliki hirarki lingkungan diasumsikan 10km/jam dimana asumsi ini dikutip dari peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006. Peraturan tersebut berbunyi “ j a l i n g k u n g a n adalah jalan yang dibangun dengan kecepatan rencana 10 k m / j a m ” . Kecepatan tempuh pada hirarki lokal sekunder yang tidak terdapat pada data dinas perhubungan diasumsikan dengan kecepatan rata rata pada hirarki lokal sekunder yaitu sebesar 31,9 km/jam.

Tabel 3.3 Waktu Tempuh Berdasarkan Jarak Jangkauan

No	Jarak Jangkauan(km)	Kecepatan(km/jm)	Waktu Tempuh (menit)
1	2.5	30	5
2	5	30	10

3	7.5	30	15
---	-----	----	----

Gambar 3. 4 Peta Ruas jalan



4) Identifikasi Sumber Air

Berdasarkan kondisi air, di Kabupaten Sidoarjo ada dua jenis rasa air yaitu air asin dan tawar. Total ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan air asin yaitu seluas 163,13 Km² dan 10 Kecamatan lainnya murni air tawar. Air dan pemadaman kebakaran akan selalu bersama-sama. Secara global, air merupakan sumber daya kita yang berlimpah. Harganya murah. Ketika sistem air publik diadakan, pasokan airnya tersedia hampir tak pernah kehabisan. Ketikadipergunakan dengan cermat, air sangat efektif menyerap panas dan memadamkan berbagai kebakaran.

Untuk alasan ini, organisasi pemadam kebakaran di seluruh dunia mendasarkan operasi utamanya dengan penggunaan air sebagai bahan pemadaman api kebakaran. Sistem pasokan air publik dan hidran kebakaran melibatkan belanja modal yang tidak sedikit, namun masa pakainya secara tipikal berakhir antara 70 s/d 100 tahun. Sebuah sistem pasokan air publik dan hidran kebakaran yang dirancang dan dipasang secara cermat adalah sebuah investasi jangka panjang dalam rangka keselamatan komunitas dan sudah seharusnya menerapkan perencanaan jangka panjang dan standar keteknikan yang tepat. Pasokan air yang cukup untuk mengatasi bahaya

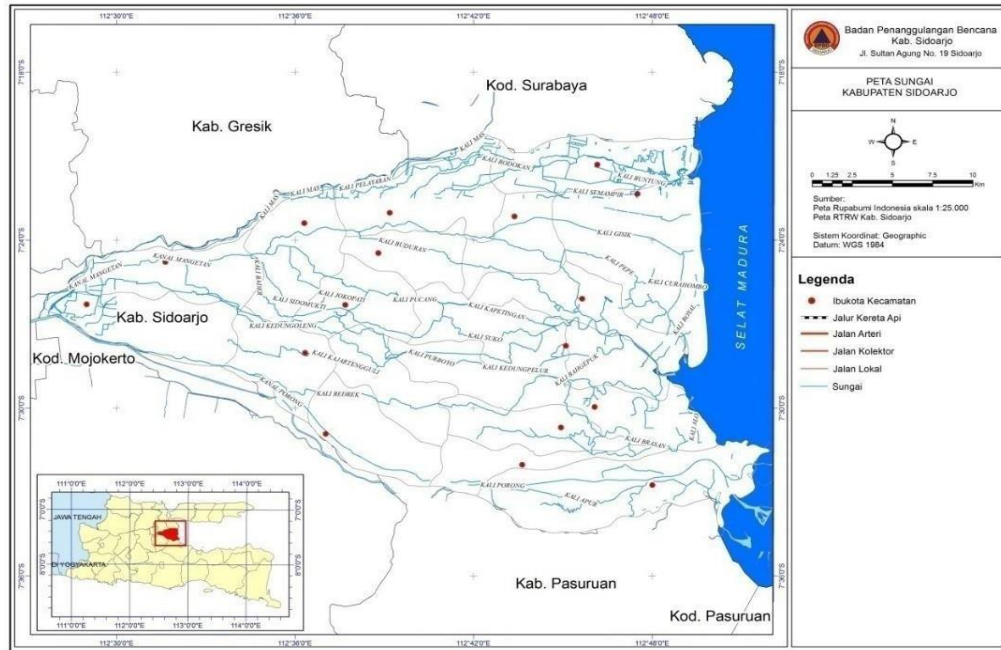
kebakaran serta transportasi yang menunjang merupakan komponen-komponen yang sangat vital dalam perencanaan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

Tabel 3.4 Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Air (Ha)

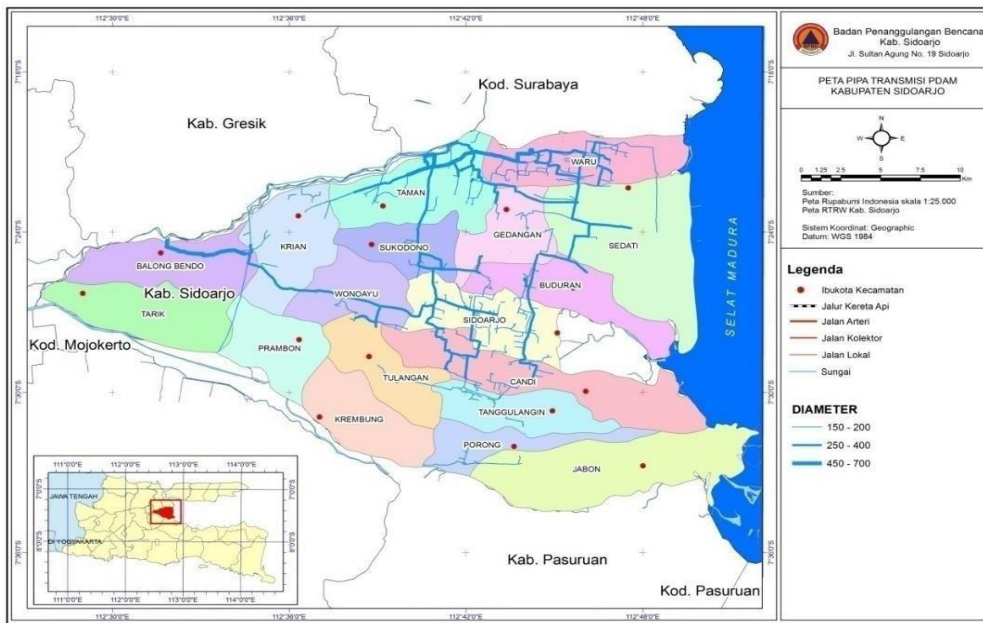
No	Kecamatan	Daerah Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 - 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4063,62	308,14	-	-	6.256
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krembung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongbendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
Jumlah/Total		16.312,69	1.573,75	610,40	2.018,55	71.424,25

Sumber : Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2013

Gambar 3.5 Peta Sungai Kabupaten Sidoarjo



Gambar 3.6 Peta Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Sidoarjo

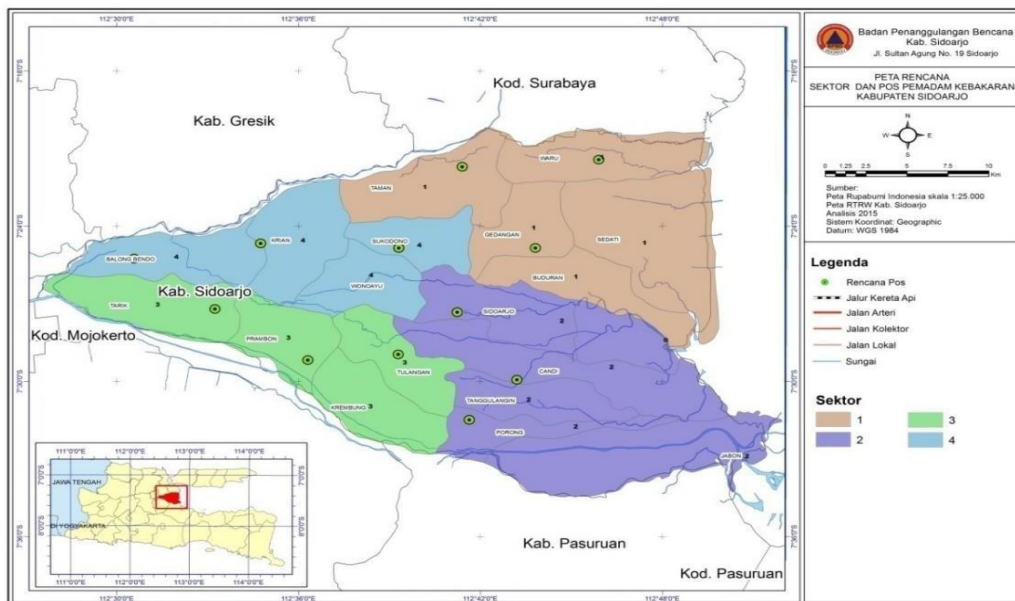


5) Arahan Rekomendasi Lokasi Pos Pemadam Kebakaran Yang Baru

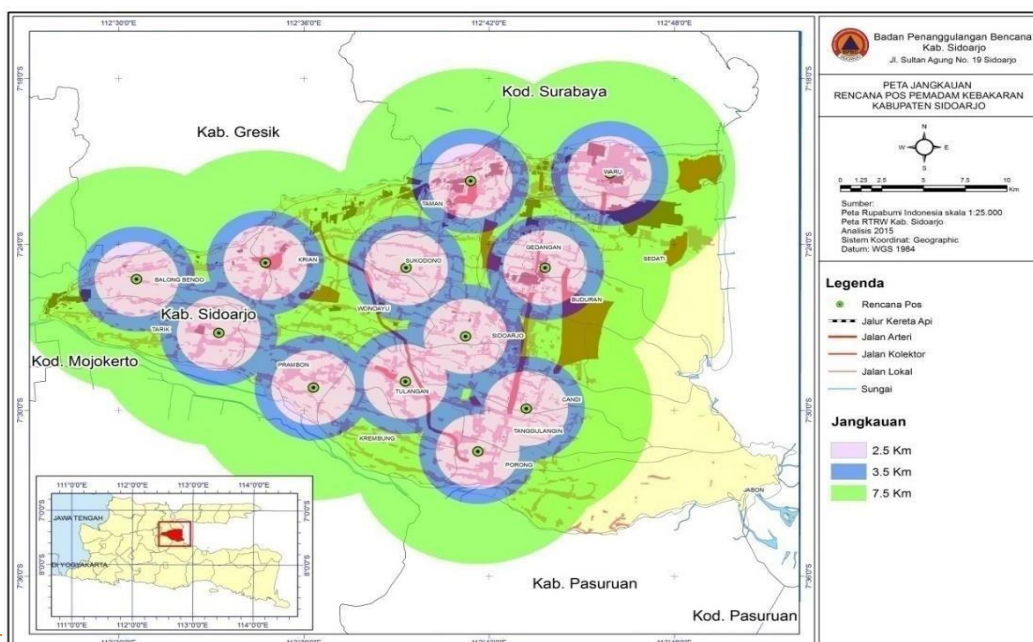
Jumlah pos pemadam Kebakaran yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan akan pelayanannya akibat pesatnya pembangunan kota dan daerah pinggirannya. Banyak kasus kebakaran yang terjadi mengakibatkan api lebih dahulu membakar isi bangunan dan menjalar ke bangunan-bangunan sekitar sebelum pasukan pemadam tiba di lokasi, jika dilihat dari waktu kedatangan sejak diterima informasi bisa

mencapai lebih dari 15 menit sehingga banyak korban serta kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, kebutuhan akan pelayanan publik/emergency membutuhkan jumlah yang proporsional dengan kebutuhannya dan merata bagi setiap orang, baik kaya/miskin, tinggal di pusat kota/pinggiran. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui survei berbagai variabel diatas , maka diperlukan penambahan pos pemadam kebakaran di beberapa tempat. Rencana letak pos pemadam kebakaran yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah di wilayah Sektor Pemadam Kebakaran yang padat pemukiman dan pabrik. Dan dari sektor - sektor tersebut membawahi beberapa Pos Pemadam Kebakaran.

Gambar 3. 7 Peta Rencana Usulan WMK, Sektor dan Pos



Gambar 3. 8 Peta Rencana Jangkauan Usulan WMK, Sektor dan Pos



Sesuai dengan Standar perletakan pos pemadam kebakaran :

1. Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu:
 - a. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
 - b. 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.
 - c. Berdasarkan standar *Insurance Service Office (ISO)* Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu:
 - a. Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan
 - b. Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan
 - c. Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran
- Dari table di bawah ini dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 Kecamatan dengan 322 Desa dan 31 Kelurahan.

Tabel 3.5 Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.
1.	Tarik	20
2.	Prambon	20
3.	Kremlung	19
4.	Porong	16
5.	Jabon	14
6.	Tanggulangin	18
7.	Candi	24
8.	Tulangan	22
9.	Wonoayu	23
10.	Sukodono	19
11.	Sidoarjo	24
12.	Buduran	15
13.	Sedati	16
14.	Waru	17
15.	Gedangan	15
16.	Taman	24
17.	Krian	22
18.	Balong bendo	20
	Total	348
	Sumber : Badan Pusat Statistik Sidoarjo, 2022	

Berdasarkan Kepmen PU No.11/KPTS/2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu:

- a) Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 7,5 km dari sektor.
- b) 1 (satu) pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan.

Dari Kepmen di atas agar jangkauan layanan pos pemadam kebakaran dapat terpenuhi, maka wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai 322 desa dan kelurahan akan di bagi 4 sektor pemadam kebakaran dengan masing-masing sektor terdiri atas 4 pos pemadam kebakaran sehingga dapat memenuhi jangkauan layanannya untuk setiap wilayahnya masing masing. Berdasarkan analisis tersebut Kabupaten Sidoarjo akan dibagi menjadi:

Tabel 3.6 Sektor di Kabupaten Sidoarjo

No. Sektor	Wilayah	Pos
I	Kec. Waru, Taman, Gedangan, Sedati Buduran	3 pos (Taman, Waru, Buduran)
II	Kec. Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong	3 Pos (Sidoarjo, Candi, Porong)
III	Kec. Tulangan, Krembung, Prambon, Tarik	3 (Tulangan, Prambon, Tarik)
IV	Kec. Balongbendo, Krian, Sukodono, Wonoayu	3 (Balongbendo, Krian, Sukodono)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mengatur bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan Penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ada di daerah kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas melaksanakan menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan serta tugas khusus yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPBD menghadapi berbagai permasalahan yang tentunya membutuhkan adanya alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Jumlah pos pemadam kebakaran masih jauh dari jumlah ideal sehingga terdapat kesenjangan yang jauh antara luas wilayah yang harus dilayani dengan jumlah pos pemadam kebakaran yang ada;
3. Penanganan Pandemi Covid-19 yang memerlukan koordinasi lintas sektoral secara kontinyu dan berkelanjutan;
4. Kualitas dan kuantitas SDM kebencanaan dan kebakaran yang belum memadai untuk mendukung kegiatan;
5. Belum terjalannya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;
6. Sistem administrasi pengelolaan logistik perlu ditingkatkan.
7. Minimnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
8. Minimnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana dan kebakaran termasuk sarana prasarana pencegahan dan kedaruratan di wilayah rawan bencana;
9. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
10. Kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;
11. Potensi ancaman bencana tahunan dalam bentuk kebakaran, banjir, puting beliung dan kekeringan serta potensi ancaman bencana lainnya yang bersinggungan dengan kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat industri dan kawasan penyangga, antara lain :
 - a. Wabah Penyakit/Pandemi Covid-19
 - b. Banjir bandang dan rob
 - c. Konflik sosial
 - d. Kegagalan teknologi
 - e. Gerakan tanah/longsor

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”** .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke-3 “Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan” .

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 3. 7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlangsungan Lingkungan			
Program Penanggulangan Bencana	1. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Jumlah pos pemadam kebakaran masih jauh dari jumlah ideal	1. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bencana dan Kebakaran; 2. Terbatasnya kemampuan daerah dalam penambahan pos pemadam kebakaran unit	1. Dukungan anggaran APBD Provinsi dalam pemenuhan kegiatan penunjang SPM; 2. Adanya Kerjasama dengan dunia usaha (CSR) dalam

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlangsungan Lingkungan			
	<p>sehingga terdapat kesenjangan yang jauh antara luas wilayah yang harus dilayani dengan jumlah pos pemadam kebakaran yang ada</p> <p>3. Kualitas dan kuantitas SDM kebencanaan dan kebakaran yang belum memadai untuk mendukung kegiatan;</p> <p>4. Belum terjalannya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;</p> <p>5. Sistem administrasi pengelolaan dan pendistribusian logistik perlu ditingkatkan</p> <p>6. Minimnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;</p> <p>7. Minimnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana dan kebakaran termasuk sarana prasarana</p>	<p>baru;</p> <p>3. Kurangnya tenaga / aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan kedaruratan dan pasca bencana serta kebakaran</p> <p>4. Sulitnya mendapatkan data dukung teknis terkait kebencanaan</p> <p>5. Belum adanya sarana penyimpanan dan pendistribusian logistik yang memadai</p> <p>6. Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah rawan bencana</p> <p>7. Belum adanya sarana prasarana kedaruratan di wilayah rawan bencana seperti rambu-rambu evakuasi, <i>hydrant</i> dan mobil pemadam kebakaran yang dapat menjangkau lokasi dengan akses yang sulit</p> <p>8. Belum optimalnya integrasi rencana penanggulangan</p>	<p>pembentukan pos pemadam kebakaran unit baru;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas SDM bencana dan kebakaran, serta penambahan aparatur</p> <p>4. Adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo menjadi legalitas dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam penanggulangan bencana;</p> <p>5. Mekanisme pengadaan logistik telah dilaksanakan sesuai dengan waktu darurat bencana sehingga logistic langsung disalurkan dan tidak memerlukan sarana penyimpanan</p> <p>6. Adanya dukungan anggaran dari</p>

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlangsungan Lingkungan			
	<p> Pencegahan dan kedaruratan di wilayah rawan bencana;</p> <p>8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;</p> <p>9. Kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana</p>	<p>bencana (RPB) dengan rencana pembangunan daerah;</p> <p>9. Terbatasnya sarana penyampaian informasi bencana serta belum adanya tenaga ahli yang kompeten dalam penyampaian informasi di wilayah</p>	<p>APBD Provinsi terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas di wilayah</p> <p>7. Adanya anggaran APBD-Desa, Desa secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan minimal sarana prasarana kedaruratan bencana dan kebakaran</p> <p>8. Rencana Penanggulangan Bencana telah dilegalisasi dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</p> <p>9. Pemanfaatan sistem informasi dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi bencana, serta adanya Kerjasama dengan fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi</p>

3.3 TELAAHAN RENSTRA PADA K/L DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI TERKAIT

Analisa Rencana Strategis dari Kementerian, Lembaga dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) diharapkan memberikan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis dari OPD Kabupaten Sidoarjo terhadap sasaran Renstra K / L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Renstra tentunya tidak dapat lepas dari rencana strategis BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur. Seperti tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 19 ayat 2 yang menentukan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tujuan untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dari BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur yang kemudian dijadikan acuan dalam penentuan indikator kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo.

Terkait hal tersebut penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan analisis dan komparasi capaian sasaran Renstra sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Telaahan Renstra pada Kementerian / Lembaga sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	3		4	5
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	1. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Kualitas dan	1. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bencana; 2. Kurangnya tenaga /	1. Dukungan anggaran APBD Provinsi dalam pemenuhan kegiatan penunjang SPM; 2. Peningkatan kapasitas SDM bencana serta

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	3	<p>kuantitas SDM kebencanaan yang belum memadai untuk mendukung kegiatan;</p> <p>3. Belum terjalannya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;</p> <p>4. Sistem administrasi pengelolaan dan pendistribusian logistik perlu ditingkatkan</p> <p>5. Minimnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;</p> <p>6. Minimnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana termasuk sarana prasarana</p>	<p>aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan kedaruratan dan pasca bencana</p> <p>3. Sulitnya mendapatkan data dukung teknis terkait kebencanaan</p> <p>4. Belum adanya sarana penyimpanan dan pendistribusian logistik yang memadai</p> <p>5. Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah rawan bencana</p> <p>6. Belum adanya sarana prasarana kedaruratan di wilayah rawan bencana seperti rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</p> <p>7. Belum optimalnya integrasi rencana penanggulangan</p>	<p>penambahan aparatur</p> <p>3. Adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo menjadi legalitas dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam penanggulangan bencana;</p> <p>4. Mekanisme pengadaan logistik telah dilaksanakan sesuai dengan waktu darurat bencana sehingga logistic langsung disalurkan dan tidak memerlukan sarana penyimpanan</p> <p>5. Adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi terkait pelaksanaan</p>

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	3		4	5
		<p> Pencegahan dan kedaruratan di wilayah rawan bencana;</p> <p>7. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;</p> <p>Kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana</p>	<p>bencana (RPB) dengan rencana pembangunan daerah;</p> <p>1. Terbatasnya sarana penyampaian informasi bencana serta belum adanya tenaga ahli yang kompeten dalam penyampaian informasi di wilayah</p>	<p>peningkatan kapasitas di wilayah</p> <p>6. Adanya anggaran APBD-Desa, Desa secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan minimal sarana prasarana kedaruratan bencana</p> <p>7. Rencana Penanggulangan Bencana telah dilegalisasi dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</p> <p>1. Pemanfaatan sistem informasi dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi bencana, serta adanya Kerjasama dengan fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi</p>

Tabel 3. 9 Telaahan Renstra pada Kementerian / Lembaga sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran pada Renstra Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Jumlah pos pemadam kebakaran masih jauh dari jumlah ideal sehingga terdapat kesenjangan yang jauh antara luas wilayah yang harus dilayani dengan jumlah pos pemadam kebakaran yang ada 3. Kualitas dan kuantitas SDM kebencanaan dan kebakaran yang belum memadai untuk mendukung kegiatan; 4. Belum terjalannya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan; 5. Sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bencana dan Kebakaran; 2. Terbatasnya kemampuan daerah dalam penambahan pos pemadam kebakaran unit baru; 3. Kurangnya tenaga / aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan kedaruratan dan pasca bencana serta kebakaran 4. Sulitnya mendapatkan data dukung teknis terkait kebencanaan 5. Belum adanya sarana penyimpanan dan pendistribusian logistik yang memadai 6. Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran APBD Provinsi dalam pemenuhan kegiatan penunjang SPM; 2. Adanya Kerjasama dengan dunia usaha (CSR) dalam pembentukan pos pemadam kebakaran unit baru; 3. Peningkatan kapasitas SDM bencana dan kebakaran, serta penambahan aparatur 4. Adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo menjadi legalitas dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam penanggulangan bencana;

No	Sasaran pada Renstra Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>administrasi pengelolaan dan pendistribusian logistik perlu ditingkatkan</p> <p>6. Minimnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;</p> <p>7. Minimnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana dan kebakaran termasuk sarana prasarana pencegahan dan kedaruratan di wilayah rawan bencana;</p> <p>8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;</p> <p>Kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka</p>	<p>masyarakat khususnya masyarakat di daerah rawan bencana</p> <p>7. Belum adanya sarana prasarana kedaruratan di wilayah rawan bencana seperti rambu-rambu evakuasi, <i>hydrant</i> dan mobil pemadam kebakaran yang dapat menjangkau lokasi dengan akses yang sulit</p> <p>8. Belum optimalnya integrasi rencana penanggulangan bencana (RPB) dengan rencana pembangunan daerah;</p> <p>Terbatasnya sarana penyampaian informasi bencana serta belum adanya tenaga ahli yang kompeten dalam penyampaian informasi di wilayah</p>	<p>5. Mekanisme pengadaan logistik telah dilaksanakan sesuai dengan waktu darurat bencana sehingga logistic langsung disalurkan dan tidak memerlukan sarana penyimpanan</p> <p>6. Adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas di wilayah</p> <p>7. Adanya anggaran APBD-Desa, Desa secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan minimal sarana prasarana kedaruratan bencana dan kebakaran</p> <p>8. Rencana Penanggulangan Bencana telah dilegalisasi dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan</p>

No	Sasaran pada Renstra Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		penanggulangan bencana		<p>Bencana Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</p> <p>Pemanfaatan sistem informasi dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi bencana, serta adanya Kerjasama dengan fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi</p>

Tabel 3. 10 Telaahan Renstra pada Perangkat Daerah Provinsi sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Kualitas dan kuantitas SDM kebencanaan yang belum memadai untuk mendukung kegiatan; 3. Belum terjalannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bencana; 2. Kurangnya tenaga / aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan kedaruratan dan pasca bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran APBD Provinsi dalam pemenuhan kegiatan penunjang SPM; 2. Peningkatan kapasitas SDM bencana serta penambahan aparatur 3. Adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga / OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan;</p> <p>4. Sistem administrasi pengelolaan dan pendistribusian logistik perlu ditingkatkan</p> <p>5. Minimnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;</p> <p>6. Minimnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana termasuk sarana prasarana pencegahan dan kedaruratan di wilayah rawan bencana;</p> <p>7. Belum optimalnya</p>	<p>3. Sulitnya mendapatkan data dukung teknis terkait kebencanaan</p> <p>4. Belum adanya sarana penyimpanan dan pendistribusian logistik yang memadai</p> <p>5. Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah rawan bencana</p> <p>6. Belum adanya sarana prasarana kedaruratan di wilayah rawan bencana seperti rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</p> <p>7. Belum optimalnya integrasi rencana penanggulangan bencana (RPB) dengan rencana pembangunan daerah;</p> <p>8. Terbatasnya sarana</p>	<p>Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo menjadi legalitas dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam penanggulangan bencana;</p> <p>4. Mekanisme pengadaan logistik telah dilaksanakan sesuai dengan waktu darurat bencana sehingga logistic langsung disalurkan dan tidak memerlukan sarana penyimpanan</p> <p>5. Adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas di wilayah</p> <p>6. Adanya anggaran APBD-Desa, Desa</p>

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		<p>perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;</p> <p>8. Kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana</p>	<p>penyampaian informasi bencana serta belum adanya tenaga ahli yang kompeten dalam penyampaian informasi di wilayah</p>	<p>secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan minimal sarana prasarana kedaruratan bencana</p> <p>7. Rencana Penanggulangan Bencana telah dilegalisasi dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026</p> <p>2. Pemanfaatan sistem informasi dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi bencana, serta adanya Kerjasama dengan fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi</p>

Tabel 3. 11 Telaahan Renstra pada Perangkat Daerah Provinsi sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Jumlah pos pemadam kebakaran masih jauh dari jumlah ideal sehingga terdapat kesenjangan yang jauh antara luas wilayah yang harus dilayani dengan jumlah pos pemadam kebakaran yang ada 3. Kualitas dan kuantitas SDM kebencanaan dan kebakaran yang belum memadai untuk mendukung kegiatan; 4. Minimnya pengetahuan serta rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai arti pentingnya pencegahan kebakaran; 5. Minimnya sumber daya, sarana dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bencana dan Kebakaran; 2. Terbatasnya kemampuan daerah dalam penambahan pos pemadam kebakaran unit baru; 3. Kurangnya tenaga / aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 4. Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah rawan kebakaran 5. Belum adanya SDM dan sarana prasarana kedaruratan di wilayah rawan kebakaran seperti <i>hydrant</i> dan mobil pemadam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran APBD Provinsi dalam pemenuhan kegiatan penunjang SPM; 2. Adanya Kerjasama dengan dunia usaha (CSR) dalam pembentukan pos pemadam kebakaran unit baru; 3. Peningkatan kapasitas SDM bencana dan kebakaran, serta penambahan aparatur 4. Dukungan anggaran penunjang sosialisasi pencegahan kebakaran 5. Adanya anggaran APBD-Desa, Desa secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan minimal sarana prasarana kedaruratan bencana dan kebakaran serta pembentukan relawan kebakaran

No	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>prasarana pendukung dalam penanggulangan kebakaran termasuk sarana prasarana pencegahan di wilayah rawan kebakaran;</p>	<p>kebakaran yang dapat menjangkau lokasi dengan akses yang sulit</p>	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo berkembang menjadi wilayah industri, perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah Jawa Bali (termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo) sebagai pusat pengembangan utama sentra pangan nasional, pengembangan sumberdaya alam yang hemat ruang (intensif) terutama perikanan tangkap darat, perkebunan dengan agrotourism, pertambangan migas dan non migas, pengembangan industri pengolahan yang hemat ruang dan air serta ramah lingkungan, pengembangan permukiman yang terkendali, pusat pertumbuhan utama ekonomi dan pintu gerbang utama global dan nasional termasuk pelayanan pemerintahan nasional. Kawasan ekonomi Potensial di Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan dalam RTRW Propinsi adalah Kapuk (Kawasan Pengembangan Utama Komoditi). Berikut merupakan isu strategis terkait RTRW dan KLHS.

Tabel 3. 12 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Adanya dampak luapan lumpur lapindo di Kecamatan Porong dan Tanggulangin yang secara tidak langsung mengubah tata guna lahan dan struktur ruang Kabupaten Sidoarjo	Belum optimalnya pengelolaan area terdampak lumpur Sidoarjo	Pengaliran lumpur ke Kali Porong menimbulkan dampak lain terhadap lingkungan	BPBD mendorong untuk peningkatan koordinasi dengan instansi terkait yaitu DLHK dan BPLS

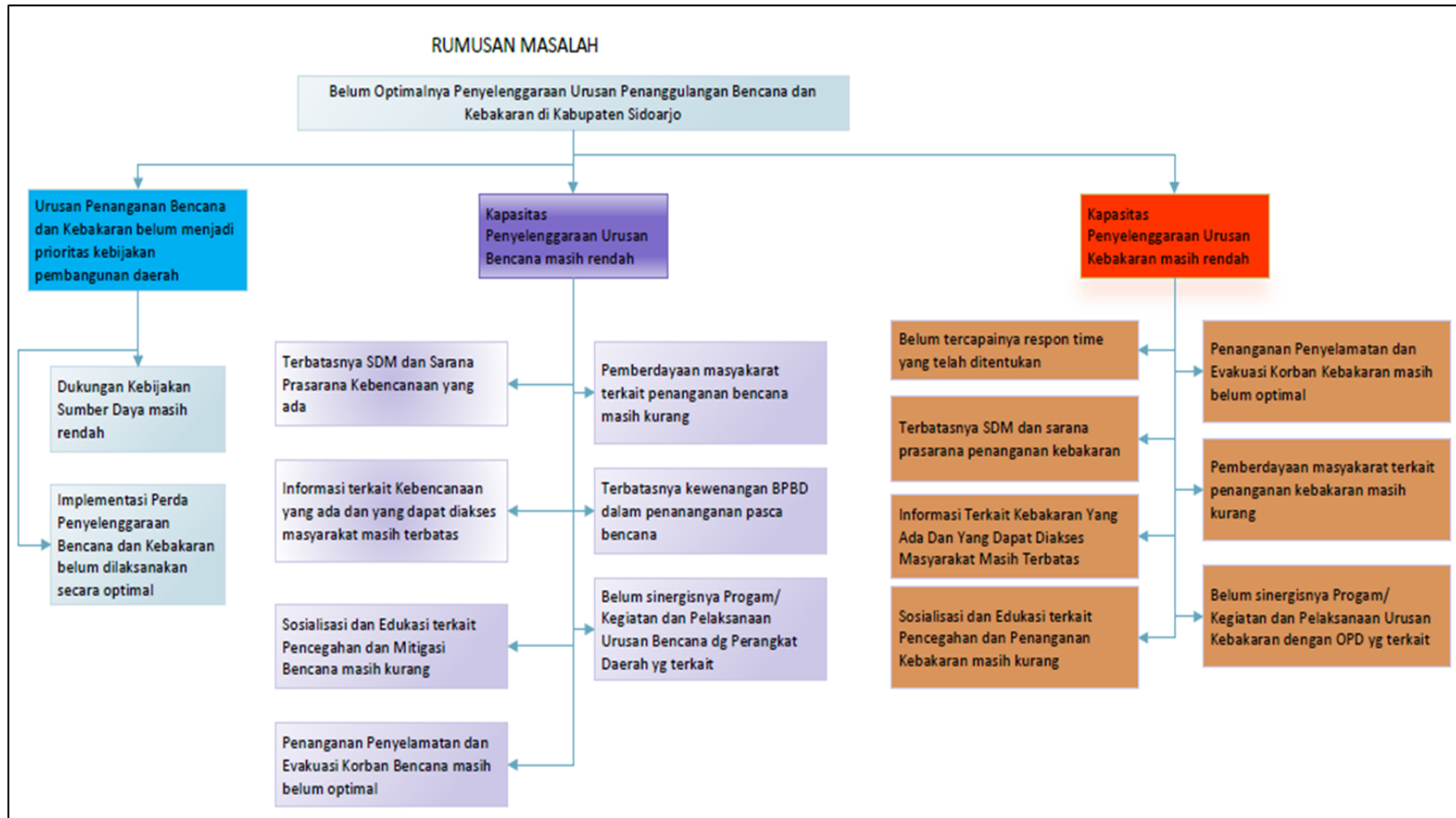
Tabel 3. 13 Telaah Kajian Lingkungan Strategis Kabupaten Sidoarjo

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman industri perdagangan jasa transportasi (Pencemaran)	Semakin banyaknya jumlah kegiatan usaha yang membuang limbah menyebabkan daya tampung beban sungai semakin menurun sehingga perlu kajian daya dukung dan daya tampung beban pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi • Kurangnya kesadaran masyarakat yang berdomisili di sekitar sungai 	BPBD berkoordinasi dan melakukan sinergi dengan OPD terkait yaitu DLHK dan BPLS
		Perlunya meninjau kembali waktu dan tempat pelaksanaan uji kualitas udara ambien	Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten	Adanya informasi dari pedoman IKLH terkait penentuan kawasan pelaksanaan uji kualitas udara ambien
		Perlunya meninjau kembali titik pantau uji kualitas Air Badan Air di sungai (Afvour dan Kanal)	Kurangnya informasi data usaha/ kegiatan yang berada di sekitar sungai (Afvour dan Kanal) - Kualitas air sungai Kab. Sidoarjo masih belum memenuhi target penurunan konsentrasi BOD	Meningkatnya koordinasi antara BPBD dengan instansi dalam penentuan titik pantau

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Perlunya peningkatan pengawasan seiring dengan pertumbuhan industri yang semakin pesat	Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan belum ada jabatan fungsional Bidang Lingkungan Hidup	Pengawasan dokumen lingkungan dan rekomendasi pengelolaan Limbah B3 serta pembuangan air limbah - Semakin tingginya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan/atau industri serta berbagai sektor instansi terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan menuntut penyelesaian yang lebih profesional	Terkadang pengaduan yang diajukan lebih pada permasalahan sosial dibanding permasalahan pencemaran lingkungan	BPBD meningkatkan koordinasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan PD/instansi terkait, pelaku usaha, LSM dan masyarakat
2	Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak	Informasi keberadaan RTH di Kab. Sidoarjo yang jauh dari proporsi ideal sehingga perlu kajian atau inventarisasi RTH	Kurang tegasnya PD/instansi penanggung jawab pengelolaan RTH di Kab. Sidoarjo	Adanya Masterplan RTH Kab. Sidoarjo

No	Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	memenuhi ketentuan teknis	Semakin tingginya potensi kerusakan lahan/tanah kering di Kab. Sidoarjo	Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (permukiman, industri, perdagangan/jasa, transportasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemkab Sidoarjo lebih selektif terhadap persetujuan pemanfaatan ruang dan ijin lokasi • Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti tercantum dalam Perda RTRW 2009- 2029
		Tingginya alih fungsi lahan dan adanya pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan teknis (Tata ruang)	Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang	Peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo
3	Sampah/Limbah B3, Air tanah, Kualitas permukiman/ Kawasan Pesisir, Air Sungai dan air Baku, kualitas udara	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman, industri, perdagangan, jasa, transportasi (Pencemaran)	Semakin bertambahnya pemukiman dan industri	Peningkatan jumlah TPA dan Sarana prasarana pengelolaan sampah

Gambar 3. 9 Identifikasi Permasalahan di BPBD



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis faktor pendorong dan faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini isu-isu strategi ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- 1.) Belum berubahnya paradigma masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana;
- 2.) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan;
- 3.) Tingginya derajat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana;
- 4.) Keterbatasan petugas dalam upaya penanggulangan bencana;
- 5.) Keterbatasan sarana-prasarana pendukung upaya penanggulangan bencana;
- 6.) Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dengan komponen masyarakat lain;
- 7.) Pola pembangunan yang masih mengabaikan kejadian bencana;
- 8.) Pola pembangunan yang belum berbasis pada Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
- 9.) Belum optimalnya peraturan / regulasi tentang kebencanaan di tingkat OPD

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
- b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Skor Kriteria Penentuan isu-isu Strategis

NO	Kriteria	Bobot
1	Belum berubahnya paradigma masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana	10
2	Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan	11

3	Tingginya derajat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana	8
4	Keterbatasan petugas dalam upaya penanggulangan bencana	7
5	Keterbatasan sarana-prasarana pendukung upaya penanggulangan bencana	8
6	Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dengan komponen masyarakat lain.	11
7	Pola pembangunan yang masih mengabaikan kejadian bencana	15
8	Pola pembangunan yang belum berbasis pada Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	15
9	Belum optimalnya peraturan / regulasi tentang kebencanaan di tingkat OPD	15
	Total	100

Perumusan isu-isu strategis di samping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/instansi BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misinya. Sebagai lembaga penanggulangan bencana berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 15 Nilai Skala Kriteria Atas Isu-isu Strategis

Isu Strategis	KRITERIA PENILAIAN					Total Score	Urutan Prioritas
	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5		
SCORE	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3		
Isu 1	3	3	3	3	3	15	1
Isu 2	3	3	3	2	3	14	2
Isu 3	2	3	2	2	3	12	3
Isu 4	3	2	1	1	3	10	4
Isu 5	3	2	1	1	2	9	5
Isu 6	2	2	1	2	2	9	6
Isu 7	1	3	2	1	1	8	8
Isu 8	3	2	1	1	2	9	7
Isu 9	3	1	1	1	2	8	9

Keterangan :

Kriteria 1 :Terkait langsung dengan yang menyebabkan masalah pelayanan BPBD Skor 1 jika kurang terkait, skor 2 jika cukup terkait dan skor 3 jika sangat terkait langsung

Kriteria 2 :Menimbulkan dampak negatif signifikan atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, Skor 1 jika kurang menimbulkan dampak negatif, skor 2 jika cukup menimbulkan dampak negatif, dan skor 3 jika sangat menimbulkan dampak negatif

Kriteria 3 :Dapat diselesaikan melalui kompetensi sumberdaya/program BPBD, Skor 1 jika kurang dapat diselesaikan, skor 2 jika cukup dapat diselesaikan, dan skor 3 jika sangat dapat diselesaikan

Kriteria 4 :Dapat diselesaikan dengan peningkatan kinerja BPBD
Skor 1 jika kurang dapat diselesaikan, skor 2 jika cukup dapat diselesaikan, dan skor 3 jika sangat dapat diselesaikan

Kriteria 5 :Keberhasilan penanganan akan membantu meningkatkan kontribusi BPBD pada pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan. Skor 1 jika kurang dapat meningkatkan kontribusi BPBD, skor 2 jika cukup dapat meningkatkan kontribusi BPBD dan skor 3 jika dapat meningkatkan kontribusi BPBD

Dari tabel 3.11 didapatkan urutan prioritas isu strategis adalah :

1. Belum berubahnya paradigma masyarakat dan aparat dalam penanggulangan bencana
2. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan
3. Tingginya derajat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana
4. Keterbatasan petugas dalam upaya penanggulangan bencana;
5. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung upaya penanggulangan bencana;
6. Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dengan komponen masyarakat lain;
7. Pola pembangunan yang belum berbasis pada Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
8. Pola pembangunan yang masih mengabaikan kejadian bencana;
9. Belum optimalnya peraturan / regulasi tentang kebencanaan di tingkat OPD

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan, maka BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Kepala Daerah Sidoarjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tujuan yaitu meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Meningkatnya kapasitas penanganan bencana
2. Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Adapun indikator kinerja atas tujuan strategis yang dijadikan alat ukur keberhasilan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Semakin turun

skor IRB semakin baik penanganan bencana suatu daerah. Perhitungan skor IRB dilakukan dengan melaksanakan forum diskusi grup / *Forum Group Discussion (FGD)* yang melibatkan seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan bencana dari kalangan pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

2. Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran

Rata-rata waktu tanggap / respon time dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan waktu yang dicapai dalam penanganan kebakaran dibagi dengan seluruh kejadian kebakaran yang ditangani.

Sedangkan indikator **sasaran strategis** yang dijadikan alat ukur keberhasilan dari capaian kinerjanya adalah :

1. **Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo**

Pengukuran IKD dilakukan untuk mengetahui skor kapasitas suatu daerah dalam penanganan bencana. Dari skor IKD akan dapat diketahui berapa skor Indeks Risiko Bencana (IRB).

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi skor IKD yang mewakili komponen kapasitas, maka skor Indeks Risiko Bencana akan menurun. Secara grafis, rumus Indeks Risiko Bencana sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4. 1 Komponen Indek Resiko Bencana

$\frac{D i s a s t e r s r k H a z a r d \times V u l n e r a b l e}{C a p a c i t y}$	Hazard / Ancaman : Ancaman / Potensi Bencana yang terjadi di sebuah daerah (sesuai UU 24/2007 ada 13 jenis ancaman bencana di Indonesia)
$\frac{A n c a m a n \times K e r e n t a n a n}{K a p a s i t a s}$	Vulnerable / Kerentanan : kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya / ancaman bahkan bencana yang terdiri dari kerentanan fisik, sosial, ekonomi, lingkungan dan politik
	Capacity / Kapasitas : Intensitas Kemampuan Komunitas / Masyarakat dalam menghadapi ancaman dan atau bencana yang berwujud Ketangguhan

Indeks Kapasitas di peroleh berdasarkan tingkat ketahanan daerah pada suatu waktu. Tingkat Ketahanan Daerah bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian kapasitas ini. Oleh karenanya penghitungan Tingkat Ketahanan Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan Peta Ancaman Bencana pada daerah yang sama. Indeks Kapasitas diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada beberapa pelaku / stakeholder penanggulangan bencana pada suatu daerah.

2. Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se- Kabupaten Sidoarjo)

Definisi Operasional :

Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (15 menit)(:) Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran x 100%

3. Jumlah penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan

Definisi Operasional :

Jumlah penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan (:) Jumlah keseluruhan penanganan evakuasi dan penyelamatan x 100%

4. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah.

Komponen nilai SAKIP :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Internal
- e. Capaian Kinerja

5. Nilai RB

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pelaksanaan evaluasi RB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi RB dilaksanakan secara mandiri. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah, yang dilakukan oleh Tim Asesor Perangkat Daerah.

6. Nilai IPP

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu sendiri dilakukan melalui *desk evaluation* pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori :

Tabel 4. 1 Klasifikasi Nilai IPP

Range	Kategori	Keterangan
0-100	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

7. Nilai SKM

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Pelaksanaan / pengukuran survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara online melalui <http://ikm.sidoarjokab.go.id/>

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4. 2 **Tujuan** (indikator dan target tujuan) dan **Sasaran** (indikator dan target sasaran)
RENSTRA BPBD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026

Misi-3 Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Indeks Resiko Bencana (IRB)	112,82	104,72	98,44	92,53	86,98	81,76	76,85	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	0,68	0,74	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
		2. Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran	22,3 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-	41,54%	55%	55%	45%	47%	49%	51%

										penyelamatan non kebakaran	Kabupaten Sidoarjo)								
											Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
KINERJA PENUNJANG																			
										Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	A	A	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	
											Nilai RB	N/A	N/A	27,22	27,22	27,22	28	28,2	
											Nilai IPP	N/A	A-	A-	4,20	4,25	4,30	4,35	
											Nilai SKM	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	90	90	90	90	

Dari data diatas, khususnya terkait dengan trend penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan bahwa trend penurunan tersebut akibat dari kenaikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas khususnya pada kolom ke 11 s/d 17. Pada dasarnya IKD adalah sebuah indeks yang menunjukkan kapasitas dalam formula risiko bencana yang terdiri dari fungsi *Hazard*(ancaman), *Vulnerable*(kerentanan) dan *Capacity* (Kapasitas). Perhitungan IKD didasarkan atas sejumlah pertanyaan (251 pertanyaan) dalam bentuk data diskrit atau nominal (ya dan tidak) dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas di suatu daerah sudah pernah dilakukan. Sebagai contoh, jika pada tahun 2021 IKD Kabuapten Sidoarjo adalah sebesar 0.74, maka dapat bermakna bahwa dari 284 pertanyaan dalam IKD telah terjawab dengan pilihan jawaban "YA" sebesar 70% atau sekitar 175,7 (178) pertanyaan tentang kapasitas yang sudah dilaksanakan. Skor KD antara 0 dan 1, sehingga angka tertingginya adalah 1 atau 100% pertanyaan dalam IKD sudah terpenuhi dan terjawab semua. Selanjutnya komponen IKD dalam formula Risiko Bencana adalah sebagai bilangan pembagi dari rumus $R = (H \times V) / C$. Dengan demikian jika kemudian angka kapasitasnya yang diperoleh dari IKD tinggi atau cenderung naik, maka angka Indeks Risikonya (R) akan rendah atau cenderung menurun seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas mulai dari kolom 4 sd 9. Dengan catatan bahwa selama ini perhitungan IRB tersebut didasarkan pada penguatan kapasitas, dan untuk indeks Hazard (ancaman) dan Vulnerable (kerentanan) ditentukan / ditetapkan dari pusat atau BNPB. Daerah, dalam hal ini BPBD Kab/Kota di seluruh Indonesia hanya diminta untuk mengukur kapasitas melalui IKD. Dengan kata lain bahwa ancaman dan kerentanan adalah unsur-unsur yang tidak bisa dihindari dan cenderung tetap. Namun untuk dapat mengurangi risiko terhadap keberadaan elemen ancaman dan kerentanan yang ada, maka BPBD dan pihak terkait lainnya yang terbangun dalam kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana yakni pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media, harus melakukan sinergi dan atau kerjasama yang mutualistis dalam upaya meningkatkan kapasitas di masing-masing daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penerjemahan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai organisasi induk. Disamping itu strategi dan arah kebijakan BPBD kabupaten Sidoarjo juga mengacu kepada Renstra BPBD Jawa Timur dan BNPB pusat sebagai organisasi Pembina. Sehingga Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, BPBD Jawa Timur, dan BNPB Pusat digunakan sebagai acuan di dalam perumusan arah kebijakan dan strategi BPBD Kabupaten Sidoarjo ini.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 - 2026 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Program yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Strategi dan Arah kebijakan ditunjukkan pada tabel 21.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sidoarjo

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan				
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kualitas Penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatnya kapasitas Penanganan bencana	a. Meningkatkan Pelayanan informasi rawan bencana	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini	
		b. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan regulasi / kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana, Perumusan dokumen teknis kebencanaan sebagai dasar Langkah Pengurangan Resiko Bencana (PRB), peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam PB, serta Inisiasi kerjasama daerah dalam penanggulangan bencana	
		c. Meningkatkan Pelayanan, Penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	Peningkatan peran serta /partisipasi masyarakat serta pemenuhan sarana prasarana untuk pendukung penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	
	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Peningkatan Kerjasama dengan pihak luar dalam pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran
			Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya	Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran baik formal maupun informal
			Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kebakaran berbasis komunitas
			Peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan dan evakuasi	Peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan dan evakuasi baik formal maupun informal
	KINERJA PENUNJANG			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah		Peningkatan Implementasi SAKIP	Meningkatkan kinerja OPD yang akuntabel, penerapan SPIP
			Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan budaya kinerja berbasis reformasi birokrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi OPD	
Peningkatan Kualitas Pelayanan sesuai Tugas dan Fungsi			Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksi OPD	

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Target Kinerja merupakan penjelasan mengenai hasil yang menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja. Kegiatan Target Kinerja yang disusun relevan dengan indikator kinerjanya, bersifat logis, dan berdasarkan pada baseline data yang jelas. Target Kinerja juga sebagai target Penetapan Kinerja dan Sasaran Kinerja pimpinan BPBD yang akan dicapai pada setiap tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui penjabaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026. Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. 1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan 2. Persentase korban bencana yang ter rehabilitasi 3. Persentase bantuan pasca bencana yang terealisasi berdasarkan laporan Jitupasna	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	2.372.985.271	1. 100% 2. 100% 3. 100%	2.780.081.178	1. 100% 2. 100% 3. 100%	13.040.575.559	1. 100% 2. 100% 3. 100%	14.389.553.439	1. 100% 2. 100% 3. 100%	15.954.227.206	1. 100% 2. 100% 3. 100%	19.995.621.573	1. 100% 2. 100% 3. 100%	68.533.044.225	BPBD	Sidoarjo
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase warga di daerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%	100%	175.434.463	100%	613.238.350	100%	858.900.960	100%	969.242.068	100%	1.095.507.489	100%	1.240.267.695	100%	4.952.550.026		
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	244.510.120	1 dokumen	293.412.144	1 dokumen	352.094.573	1 dokumen	422.513.487	5 dokumen	1.387.503.24		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	40 orang	160 orang	175.434.663	450 orang	538.238.350	500 orang	614.390.840	500 orang	675.829.924	500 orang	743.412.916	500 orang	817.754.208	2610 orang	3.565.04.701		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Indikator : 1. Persentase pesert peningkatan kapasi masyarakat/aparatu daerah rawan benc 2. Persentase warg yang mendapat peralatan perliindung dankesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana	1. 10% 2. 100%	1. 10% 2. 100%	945.13 .472	1. 15 % 2. 10 0 %	683.210 248	1. 20% 2. 100 %	11.978.9 35.559	1. 25% 2. 100 %	13.221.7 49.439	1. 30% 2. 100 %	14.669 642.80 6	1. 35% 2. 100 %	16.24 8.150 333	1. 35% 2. 100 %	35.809 65.391		
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen 99.534 963	0	-	3 dokumen	247.500 000	1 dokumen	200.000 000	1 dokumen	250.000 0.000	1 dokumen	275.000 00.000 0	7 dokumen	1.072.0 4.963		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparat yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 orang	240 orang 551.91 .579	120 orang	181.692 998	100 orang	200.476 843	150 orang	220.524 527	150 orang	242.576 6.980	150 orang	266.834 678	910 orang	1.664.0 5.605		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Saran Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	N/A	6 Dokumen 267.35 .926	6 dokumen	206.396 000	6 dokumen	4.183.81 8.880	6 dokumen	4.602.20 0.768	6 dokumen	5.062.4 20.845	6 dokumen	5.568 662.9 29	36 dokumen	19.890. 51.348		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralat Penyelamatan bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0	212 Unit	26.333.004	707 unit	197.672.750	50 unit	204.589.000	50 unit	225.047.900	50 unit	247.592.690	50 unit	272.307.959	1119 unit	1.173.503.303		
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen	0 dokumen	-	0	-	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	99.825.000	1 dokumen	109.807.500	4 dokumen	382.881.500		
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	11 kawasan	0	-	0	-	5 kawasan	2.065.711.440	4 kawasan	2.272.282.584	4 kawasan	2.499.510.842	4 kawasan	2.749.461.927	17 kawasan	9.586.967.93		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 orang	0	0	0	-	50 orang	286.016.200	50 orang	314.617.820	50 orang	346.079.602	50 orang	380.687.562	200 orang	1.327.41.184		
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	0	0	0	-	0	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	6 dokumen	-		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600 orang	0	0	150 orang	97.448.000	250 orang	107.434.000	500 orang	118.177.400	500 orang	129.995.140	500 orang	142.994.654	1900 orang	596.046.94		
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	N/A	0 dokumen	0	-	0	-	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	38.500.000	1 dokumen	42.350.000	3 dokumen	115.850.000			
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Indikator : Persentase petugas relawan yang aktif dalam masa status Siaga dan darurat bencana	1. 100% 2. 8 orang	100%	711.248.325	100%	624.813.480	100%	2.032.720.000	100%	2.236.062.000	100%	2.459.178.200	1.100% 2.10 orang	2.705.579.602	100%	10.770.17.427		
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	N/A	N/A	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Loka si	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	N/A	2 dokumen	75.905.000	2 dokumen	137.100.000	2 Dokumen	199.450.000	2 Dokumen	219.395.000	2 Dokumen	241.334.500	2 Dokumen	265.467.950	12 Dokumen	1.138.624.450		
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	N/A	100%	-	100%	25.050.000	100%	6.600.000	100%	7.260.000	100%	7.986.000	100%	8.784.600	100%	55.680.000		
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	-	100%	10.000.000	100%	627.892.000	100%	690.682.000	100%	759.749.320	100%	835.724.252	100%	2.924.067.72		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktiiasi Sistem Komando Penanganan Darur Bencana	2 laporan	6 Laporan 635.34 .325	2 lapo oran	452.663 480	4 lapo ran	1.198.80 0.000	2 lapo ran	1.318.68 0.000	2 lapo ran	1.450.8 48.000	2 lapo ran	1.595 602.8 00	18 Lapo ran	6.651.6 7.605		
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		
			Kegiatan Penataa Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Indikator : 1. Persentase dokum PB dan regulasi PB yang dilegafbrmalkan 2. Persentase laporan pertanggungjawabab penyelenggaraan PB yang terselesaikan	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%		
						541.15 .011	858.819 100	2.770.88 6.236	3.105.69 4.171	3.482.9 40.797	6.241 667.0 67	17.000. 66.382								

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokur Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Dae	1 dokumen	N/A	0	N/A	-	1 doku men	110.000 000	1 doku men	121.000 000	1 doku men	133.10 0.000	1 doku men	146.4 10.00 0	4 doku men	510.510 000		
			PenguatanKele bagaan Bencar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokume Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	N/A	N/A	0	N/A	-	1 doku men	117.960 000	1 doku men	129756 000	1 doku men	142.73 1.600	3 doku men	157.0 04.76 0	6 doku men	547.45 360		
			Kerjasama anta Lembaga dan Kemitraan dala Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KerjaSama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	N/A	N/A	0	N/A	-	1 doku men	201.500 000	1 doku men	221.650 000	1 doku men	248.81 5.000	1 doku men	268.1 96.50 0	4 doku men	935.16 500		
			Pengelolaan d Pemanfaatan Sistem Inform Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yan tersedia	N/A	3 Doku men	0	3 Do ku men	90.000. 00	3 Dok ume n	55.000. 00	3 Dok ume n	60.500. 00	3 Dok ume n	66.550 000	3 Dok ume n	73.20 5.000	18 Dok ume n	345.25 000		
			Pembian dan Pengawasan Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	N/A	N/A	0	N/A	-	1 lapor an	70.400. 00	1 lapor an	77.440. 00	1 lapor an	85.184 000	1 lapor an	93.70 2.400	4 lapor an	326.72 400		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	2 Dokumen 541.154.011	2 Dokumen 768.819.100	2 Dokumen 1.154.386.236	2 Dokumen 1.327.544.171	2 Dokumen 1.526.675.797	2 Dokumen 1.755.677.167	12 dokumen 7.074.214.82									
Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase Satuan Petugas PMK yang memiliki Sertifikasi sesuai Standar Kualifikasi 2. Persentase Mobil PMK dengan Kondisi Layak Fungsi	1. 32% 2. 80%	1. 40% 2. 80%	1. 40% 2. 80%	91.860.900 81.037,00	1. 50% 2. 80%	114.642.446.871,25	1. 55% 2. 85%	143.095.528.083,56	1. 60% 2. 85%	178.641.513.743,35	1. 60% 2. 85%	553.344.267.556						

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo	100%	100%	15.179 291.53	100 %	9.412.5 2.597	100 %	90.538. 98.537	100 %	113.366 157.546	100 %	141.68 1.946.9 33	100 %	177.0 72.73 8.666	100 %	547.250 885.818		
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pengulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	N/A	N/A	0	1 do ku men	75.000. 00	1 do ku men	127.312 750	1 do ku men	159.140 938	1 do ku men	198.92 6.172	1 do ku men	248.6 57.71 5	5 do ku men	809.03 574		
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12laporan	12 Lapor an	350.00 .000	12 lap oran	335.000 000	12 lap oran	686.039 410	12 lap oran	857.549 263	12 lap oran	1.071.9 36.578	12 lap oran	1.339 920.7 23	72 lap oran	4.640.4 5.973		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 laporan	12 Dokumen 75.000.000	12 laporan 1.581.46.797	12 laporan 69.036.02.172	12 laporan 86.295.77.715	12 laporan 107.869.222.44	12 laporan 134.836527.680	72 laporan 399.69876.50									
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			(Setiap Tahun), Sah, dan Legal																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Paket	1 paket	8.770.004.639	2 paket	715.234.200	18 paket	13.829.052.705	10 Paket	17.286.15.881	15 Paket	21.607.894.852	10 Paket	27.009.868.564	56 Paket	89.218.70.841			
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	28%	70 orang	5.984.186.900	99 orang	6.705.81.600	130 orang	6.854.29.000	160 orang	8.567.73.750	190 orang	10.709.717.188	220 orang	13.387.146.484	869 orang	52.209.14.922			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamata (SKIKP) yang Bisa Secara Perbaharu atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	N/A	N/A	0	N/A	-	N/A	-	2 desa /kelu rahan	175.000.000	2 desa /kelu rahan	194.250.000	2 desa /kelu rahan	215.617.500	6 desa /kelu rahan	584.86500		
			Penyelenggara Kerjasama dan Koordinasi anta Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kot dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	N/A	N/A	0	N/A	-	1 doku men	5.272.500	1 doku men	25.000.00	1 doku men	30.000.000	1 doku men	35.000.000	4 doku men	95.272.00		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana proteksi kebakaran bangunan/gedung y memenuhi standar	100%	100%	147.80685	100%	64.200.00	100%	64.200.00	100%	75.000.00	100%	86.650.000	100%	98.481.500	100%	536.33185		
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Da Bangunan/Gedun ngkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	147.80685	1 Dokumen	64.200.00	1 Dokumen	64.200.00	1 Dokumen	60.000.00	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	6 Dokumen	486.20685		
			Penilaian Saran Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Da Bangunan/Gedung/ ngkungan yang Memenuhi Kelaika Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	15.000.00	1 dokumen	16.650.000	1 dokumen	18.481.500	3 dokumen	50.131.00		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi pasca kebakaran	100%	100%	5.000.000	100%	-	100%	-	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	95.000.000		
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	4 dokumen	4 dokumen	5.000.000	N/A	-	N/A	-	4 dokumen	25.000.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	35.000.000	16 dokumen	95.000.000		
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Persentase sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah rawan kebakaran; 2. Persentase relawan kebakaran dilatih dan dibentuk 3. Presentase sarana prasarana yang disiapkan/diberikan kepada Relawan Kebakaran	1. 10% 2. 0 3. 0	1. 0% 2. 0 3. 0	-	1. 10% 2. 10% 3. 0%	294.950.000	1. 15% 2. 100% 3. 0%	1.258.500.000	1. 20% 2. 100% 3. 100%	1.176.289.325	1. 25% 2. 100% 3. 100%	1.296.931.151	1. 30% 2. 100% 3. 100%	1.435.293.577	1. 30% 2. 100% 3. 100%	5.462.065.553		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 orang	0	-	250 Orang	294.950.000	250 orang	311.475.000	500 Orang	125.000.000	500 Orang	130.000.000	500 Orang	140.000.000	2000 Orang	1.001.450.000	Bidang Damkar BPBD Kab. Sidoarjo	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Siste Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	N/A	N/A	0	N/A	-	1 Desa/Kelurahan	83.250.000	1 Desa/Kelurahan	92.407.000	1 Desa/Kelurahan	102.572.325	1 Desa/Kelurahan	113.855.281	4 Desa/Kelurahan	392.08106		
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Terseleksi Dukungan Supras Damkar	N/A	N/A	0	N/A	-	1 dokumen	863.857.500	1 dokumen	958.887.825	1 dokumen	1.064.358.826	1 dokumen	1.181.438.297	4 dokumen	4.068.564.447		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	18.586.826.239	100%	20.445.508.863	100%	22.490.059.749	100%	24.739.065.724	100%	27.212.972.297	100%	29.934.269.526	100%	29.934.269.526			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : 1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan 2. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	1.5 dokumen 2.8 dokumen	1.5 dokumen 2.8 dokumen	50.000.000	1.5 dokumen 2.8 dokumen	3.724.000	1.5 dokumen 2.8 dokumen	3.256.300	1.5 dokumen 2.8 dokumen	3.647.120	1.5 dokumen 2.8 dokumen	4.084.650	1.5 dokumen 2.8 dokumen	4.574.937	1.300 dokumen 2.480 dokumen	4.574.937	4.574.937	BPBD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10 dokumen	50.000.000	10 dokumen	3.724.000	10 dokumen	3.256.300	10 dokumen	3.647.120	10 dokumen	4.084.650	10 dokumen	4.574.937	60 dokumen	4.574.937	4.574.937		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	5 dokumen	0			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Loka si		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)					
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Penyusunan Dokumen RKA SKPD					m en														
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Lapora HasiKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubat RKASKPD	2 dokumen	2 doku men	0	1 do ku m en	0	1 doku men	0	1 doku men	0	1 doku men	0	1 doku men	0	5 doku men	0			
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 doku men	0	1 do ku m en	0	1 doku men	0	1 doku men	0	1 doku men	0	1 doku men	0	5 doku men	0			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Lapora HasiKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubat DPASKPD	2 dokumen	2 doku men	0	1 do ku m en	0	1 doku men	0	1 doku men	0	1 doku men	0	1 doku men	0	5 doku men	0			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	7 dokumen	-	35 dokumen	-		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	20 dokumen	-		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator : Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	87,97%	90%	9.317.580.013	90%	9.420.96.233	90%	10.551.504.581	90%	11.817.685.131	90%	13.235.807.346	90%	14.824.104.228	90%	14.824.04.228		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang	72 orang	9.317.580.013	68 orang	9.420.96.233	65 orang	9.586.91.041	65 orang	10.737.396.366	67 orang	12.025.883.930	67 orang	13.468.990.001	404 orang	13.468.90.001		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Loka si	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	0	0	0	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	0	5 laporan	0		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	393.150	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.550.000	1 laporan	6.160.500	6 laporan	16.710.500		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 berkas	1 berkas	0	1 berkas	0	0	0	1 berkas	0	1 berkas	0	1 berkas	0	5 berkas	0		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Loka si	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	-	2 laporan	0	0	0	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	10 laporan				
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,6	90	395.15251	90	480.66505	90	874.293500	90	968.320153	90	1.084.518.571	90	1.214.660.800	90	1.214.660.800		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	13 paket	28.117.693	6 paket	11.411.950	5 paket	19.321.770	6 paket	21.640.382	6 paket	24.237.228	6 paket	27.145.696	42 paket	27.145.96		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	33 paket	29.087.737	2 Paket	27.139.03	2 Paket	48.173.50	2 Paket	53.954.76	2 Paket	60.428.901	2 Paket	67.680.369	43 paket	67.680.69		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	N/A	-	0	0	3 paket	9.721.95	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.200.000	12 Paket	179.000.000	12 Paket	200.480.000	12 Paket	224.507.600	12 Paket	251.821.12	72 paket	251.481.112		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 pakte	10 paket	36.281.364	8 Paket	18.577.00	8 paket	32.137.00	10 paket	35.994.00	10 paket	40.313.280	10 paket	45.150.874	56 paket	45.150.74		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1080 buah	36 Dokumen	3.424.650	36 Dokumen	3.570.00	36 Dokumen	3.120.00	36 Dokumen	3.494.40	36 Dokumen	3.913.28	36 Dokumen	4.383.375	216 Dokumen	4.383.35		
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 paket	2 Paket	25.773.670	2 Paket	27.456.52	2 Paket	50.787.95	2 Paket	56.881.94	2 Paket	63.707.834	2 Paket	71.352.774	12 paket	71.352.74		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	4 laporan	19.797.500	4 laporan	16.725.000	4 laporan	52.031.500	4 laporan	58.275.000	4 laporan	65.268.000	4 laporan	73.100.160	24 laporan	73.100.600		
			Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	142.670.637	12 laporan	265.580.600	12 laporan	480.000.000	12 laporan	537.600.000	12 laporan	602.112.000	12 laporan	674.365.440	72 laporan	674.365.440		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kegiatan Pengada Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator : Jumlah Barang yang diadakan	41 unit	14 unit	676.630.458	20 unit	53.938.300	100 unit	1.355.544.506	30 unit	899.711.684	50 unit	2.020.77.086	36 unit	2.499.858.336	250 unit	2.499.858.336		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 unit	472.460.000	0	0	0	0	0	-	1 unit	650.000.000	1 unit	710.000.000	3 unit	1.832.480.000		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	0	-	0	0	0	0	5 unit	225.000.000	0	0	5 unit	260.850.000	10 unit	485.850.000		
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	N/A	N/A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1 unit	18.000.000	0	0	286 unit	753.103.360	0	0	50 unit	615.000.000	60 unit	682.650.000	397 unit	2.068.73.360		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 unit	11 unit	186.170.458	3 Unit	53.938.30	82 unit	602.421.146	15 unit	674.711.684	16 unit	755.677.086	18 unit	846.358.336	145 unit	846.358.336		
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengadaan Ase Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	0	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator : Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	2.293.550.550	100%	2.344.436.000	100%	2.515.065.200	100%	2.766.517.200	100%	3.043.288.900	100%	3.347.551.781	100%	3.347.517.810		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung jawab	Loka si	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000	1 Laporan	3.025.000	1 Laporan	3.327.500	6 Laporan	3.660.200		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	289.000.000	12 laporan	315.500.000	12 laporan	397.000.000	12 laporan	436.700.000	12 laporan	480.300.000	12 laporan	528.407.000	72 laporan	581.247.700		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	2.003.550.550	12 laporan	2.026.436.600	12 laporan	2.115.565.200	12 laporan	2.327.117.720	12 laporan	2.559.333.892	12 laporan	2.815.817.281	72 laporan	3.097.399.009		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	34	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang layak fungsi	90%	90%	218.130.975	90%	234.567.036	90%	681.659.856	90%	828.459.039	90%	925.074.123	90%	1.032.683.018	90%	3.269.906.691		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	N/A	0	0	1 Unit	2.986.06	1 unit	41.070.000	5 unit	45.998.000	5 unit	51.518.208	5 unit	57.700.393	17 unit	57.700.93		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	36 unit	90.000.000	36 unit	80.025.000	36 unit	100.480.000	60 unit	112.537.600	60 unit	126.042.112	60 unit	141.167.165	288 unit	141.167.165		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			dan Perizinan Alat Besar																		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	N/A	0	0	0	0	0	20 Unit	65.000.000	20 Unit	70.000.000	20 Unit	75.000.000	60 unit	210.000.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 unit	6 unit	46.130.000	30 unit	73.550.000	9 unit	111.538.856	15 unit	124.923.519	20 unit	139.914.341	25 unit	156.704.062	105 unit	652.760.778		
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	82.000.975	1 unit	78.000.000	2 unit	378.621.000	2 unit	424.055.520	2 unit	474.942.182	2 unit	531.935.244	10 unit	1.969.54.922		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pemeliharaan/ rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	0	0	0	0	1 unit	49.950.000	1 unit	55.944.000	1 unit	62.657.280	1 unit	70.176.154	4 unit	238.724.434		
			Pemeliharaan/ rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0		
			Pemeliharaan/ rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator : 1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifika	1.90% 2. 0%	1. 90% 2. 0%	0	1. 90% 2. 0%	0	1. 90% 2. 60%	241.188.260	1. 90% 2. 70%	591.630.851	1. 90% 2. 80%	659.415.533	1. 90% 2. 90%	734.972.290	1. 90% 2. 90%	2.227.229.954		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Saran dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 paket	0	0	0	0	0	0	90 paket	71.500.000	90 paket	79.365.000	90 paket	88.095.150	270 paket	238.961.150		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	0	0	0	0	0	0	0	100 orang	250.000.000	100 orang	277.500.000	100 orang	308.025.000	300 orang	835.521.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	0	0	0	0	0	100 orang	241.188.260	100 orang	270.130.851	100 orang	302.546.553	100 orang	338.852.140	400 orang	1.152.778.04		
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator : 1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah disertifikasi	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	0	0	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0	1. 100% 2. 100%	0		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng jawab	Loka si	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah (2026)				
					Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et
1	2	34		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0		

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan pada sub urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2021-2026 adalah untuk menunjang tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo, yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”***.

Implementasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung Visi Kabupaten Sidoarjo mendukung Misi Ke-3 yaitu *“Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”*, yang dijabarkan melalui rumusan Tujuan dan Sasaran pada BAB IV Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka ditetapkan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagai alat ukur untuk memantau tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian rumusan Tujuan dan Sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, dengan Indikator yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan BPBD : Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Tujuan	Satuan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Satuan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Indeks Resiko Bencana (IRB)	Skor / Nilai	Skor IRB Kabupaten Sidoarjo sesuai hasil pengukuran	112,82	104,72	98,44	92,53	86,98	81,76	76,85	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sidoarjo	Skor / Nilai	Skor IKD Kabupaten Sidoarjo sesuai hasil pengukuran	0,68	0,7	0,72	0,76	0,81	0,86	0,91
2. Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran	menit	Rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran dari total seluruh waktu penanganan kebakaran	22,3 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Meningkatnya kapasitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo)	%	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (response time) 15 menit dari seluruh kejadian kebakaran	41,54%	55,00%	55%	60%	65%	70%	75%
											Persentase penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang berhasil dilaksanakan	%	Jumlah penanganan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Tujuan	Satuan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Satuan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target										
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021	2022	2023	2024	2025	2026					
												ditangani dari seluruh kejadian non kebakaran													
INDIKATOR KINERJA PENUNJANG																									
										Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai SAKIP	Tanpa Satuan	Nilai SAKIP BPBD	72,48	80,01	80,01	81	82	83	84				
												Nilai RB	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD dalam mencapai <i>good governance</i>	N/A	N/A	27,22	27,22	27,75	28,2	28,5				
												Nilai IPP	Tanpa Satuan	Nilai IPP BPBD dalam memberikan pelayanan prima kepada publik	N/A	N/A	4,50	4,20	4,30	4,40	4,50				

Indikator Tujuan	Satuan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Satuan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021	2022	2023	2024	2025	2026
											Nilai SKM	Tanpa Satuan	Nilai SKM BPBD pada aplikasi ikm.sidoarjo kab.go.id	N/A	N/A	90	90	90	90	90

PENUTUP

Review Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo merupakan review penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan oleh seluruh aparat BPBD Kabupaten Sidoarjo setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian / *review* yang searah dengan kebijakan / prioritas pembangunan pusat / daerah. Oleh karena itu, kami berupaya untuk memperbaiki kualitas dokumen Rencana Strategis ini dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Review Rencana Strategis diperlukan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah, serta menunjang terwujudnya visi misi Kepala Daerah terpilih sesuai sub urusan / kewenangan yang ditangani.

Review Rencana Strategis diperlukan sebagai pedoman dalam penentuan arah kebijakan strategis agar capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terwujud dan terukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, Saran, masukan dan evaluasi yang membangun sangat kami harapkan dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan ini.

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana , kebakaran dan penyelamatan yang konsisten, sinergis, proporsional dan komunikatif sesuai tugas dan fungsi yang diemban BPBD dan upaya peningkatan layanan kepada *stakeholder*.

Sidoarjo, Januari 2023
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sidoarjo



Ir. DWIDIO PRAWITO, M. MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 196510121992021001